

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**OPTIMALISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PAPUA GUNA
MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL**

Oleh :

**EKO HARIYANTO, S.Sos
KOLONEL INF NRP 11940020911271**

**KERTAS KARYA PERORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXIII
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2022**

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, petunjuk dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII tahun 2022 telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) dengan judul: **“OPTIMALISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PAPUA GUNA MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL”**

Dalam kesempatan yang baik ini perkenankan Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXIII di Lemhannas RI tahun 2022. Ucapan yang sama juga Penulis sampaikan kepada Tutor Taskap kami, Bapak Andrea H Poeloengan, SH, M.Hum, MTCP dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing dalam pembuatan Taskap ini sampai selesai sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dihadapkan dengan latar belakang Penulis dalam penguasaan akademis dan terbatasnya waktu penulisan, maka kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan dari semua pihak, guna penyempurnaan penulisan naskah ini.

Besar harapan Penulis semoga Taskap ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran Penulis kepada Lemhannas RI, DPR RI, Pemerintah Republik Indonesia khususnya Bappenas, KPK, Kemenkeu, Kemenkop UKM,

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta pihak-pihak terkait dalam upaya membangun perencanaan wilayah Papua dalam mewujudkan ketahanan nasional.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita, dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama.

Sekian dan terima kasih, Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Agustus 2022

Penulis

Eko Hariyanto, S.Sos
Kolonel Inf/NRP 11940020911271



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eko Hariyanto, S.Sos
Pangkat/NRP : Kolonel Infanteri/11940020911271
Nomor peserta : 025

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXIII Tahun 2022 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
 - b. Apabila ternyata sebagian Tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia untuk dibatalkan.
2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, Agustus 2022

Penulis,



Eko Hariyanto, S.Sos
Kolonel Inf/NRP 11940020911271

DAFTAR ISI

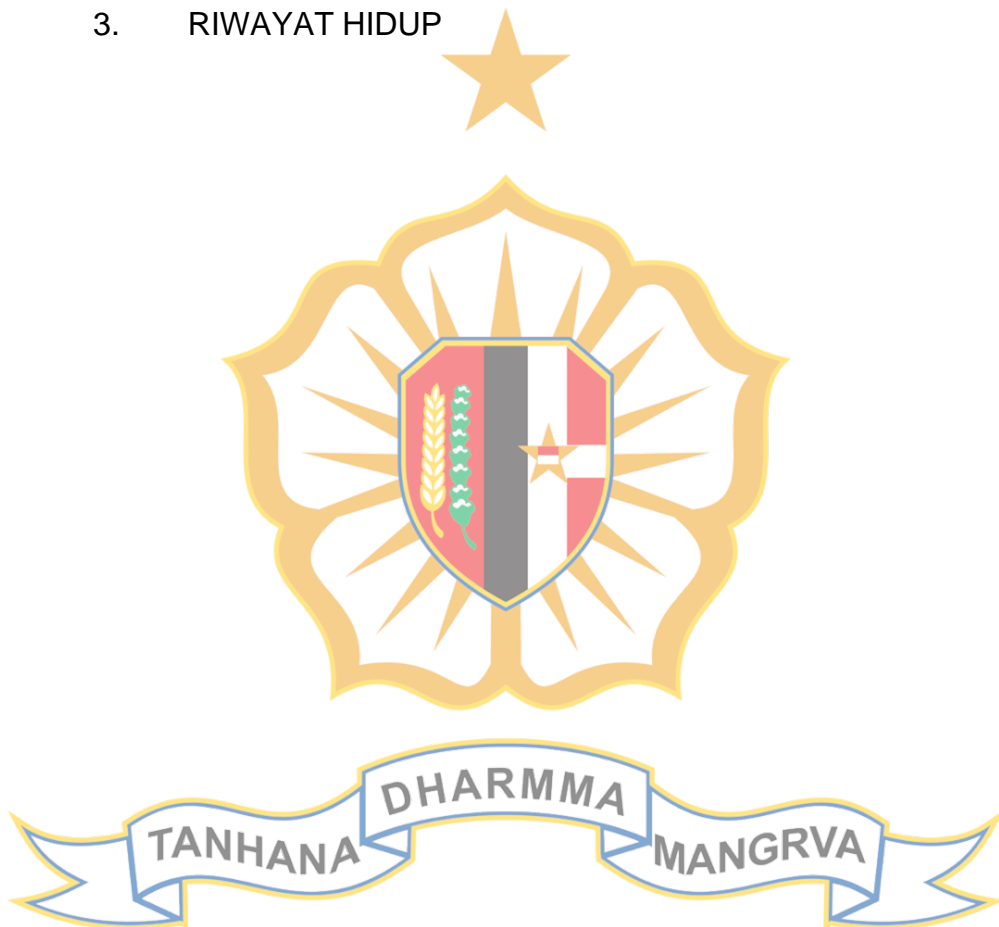
	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	5
3. Maksud dan Tujuan	5
4. Ruang lingkup dan Sistematika	5
5. Metode dan Pendekatan	6
6. Pengertian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
7. Umum	9
8. Peraturan Perundang-undangan	9
9. Kerangka Teoritis	13
10. Data dan Fakta	18
11. Lingkungan Strategis	22
BAB III PEMBAHASAN	
12. Umum	27
13. Perencanaan Pembangunan di Papua saat ini	27
14. Sinergi antar-pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan di Papua	33
15. Perencanaan pembangunan yang holistik di Papua guna mewujudkan Ketahanan Nasional	40

BAB IV PENUTUP

16.	Simpulan	57
17.	Rekomendasi	58

DAFTAR PUSTAKA**DAFTAR LAMPIRAN :**

1. ALUR PIKIR
2. KELENGKAPAN DATA
3. RIWAYAT HIDUP



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Salah satu indikasi tercapainya cita-cita nasional dapat diketahui dari kondisi ketahanan nasional suatu negara. Ketahanan yang dimaksud yaitu kemampuan untuk dapat menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi sehingga dapat menjamin program-program yang telah dicanangkan agar dapat tercapai dengan baik khususnya perihal pembangunan nasional. Sebagai negara yang memiliki luas daratan mencapai 1.919.440 km² yang terdiri dari 17.504 pulau tentu bukan perkara mudah bagi Indonesia dalam mewujudkan pembangunan secara nasional.¹ Karakteristik wilayah yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam membangun wilayah-wilayah di Indonesia khususnya di wilayah yang masih jauh dari pusat pembangunan dan masih terbatasnya akses mobilitas, seperti wilayah Papua.

Provinsi Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia bagian paling timur yang berbatasan dengan negara tetangga, Papua New Guinea. Secara historis wilayah Papua sudah menjadi bagian dari Indonesia sejak tahun 1969 dengan digelarnya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang menghasilkan pernyataan sikap masyarakat Papua sebagai bagian dari Republik Indonesia dimana salah satu keinginannya mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Namun demikian dalam perjalanannya justru wilayah Papua dinilai cukup tertinggal karena masih terdapat berbagai ketimpangan baik dari sisi politik, ekonomi, sosial-budaya dan sebagainya sehingga menjadikan Papua sebagai wilayah yang membutuhkan penanganan khusus agar tidak semakin tertinggal dengan wilayah-wilayah lainnya. Melihat kondisi yang demikian, pemerintah terus berupaya melakukan berbagai langkah konstruktif salah satunya tertuang di dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang pada intinya mengatasi keteringgalan wilayah Indonesia timur tersebut.

¹ Detik, Luas Wilayah Indonesia Lengkap Daratan dan Lautan, 20 November 2020, tersedia di <https://travel.detik.com/travel-news/d-5262317/luas-wilayah-indonesia-lengkap-daratan-dan-lautan>, diakses pada 8 Februari 2022, pukul 21.34 WIB.

Jika dilihat secara hierarki perihal pembangunan di tanah Papua didasarkan pada RPJP tahun 2005-2025 di “poin pembangunan daerah”, yaitu pembangunan diarahkan untuk dapat menyejahterahkan seluruh masyarakat pada tiap-tiap daerah sehingga dapat menekan kesenjangan yang terjadi terutama wilayah luar pulau Jawa.² Lebih lanjut dalam Permen PPN/Bappenas No. 11 tahun 2020 tentang Renstra tahun 2020-2024 dimana pada salah satu sasaran strategis yang hendak dicapai yaitu terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.³ Regulasi tersebut kemudian dituangkan di dalam Perda No. 3 tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Papua tahun 2019-2023 sebagai pedoman atas program-program yang akan dijalankan Pemda untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana Daerah diberikan kewenangan dalam mengelola wilayahnya sebagai bentuk Otonomi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴

Namun demikian kewenangan Pemda Papua dalam mengelola wilayah ternyata belum mampu mendorong percepatan pembangunan di Papua. Justru pembangunan yang dilakukan terkesan jalan ditempat karena belum baiknya perencanaan pembangunan yang dirancang. Hal ini dapat terlihat pada laporan Kodam XVII/Cenderawasih terdapat berbagai pembangunan yang telah dilaksanakan namun tidak dapat dimanfaatkan dengan baik.⁵ Padahal untuk mempercepat pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat, pemerintah telah memperpanjang dana Otsus terus hingga 2041 dimana alokasi dana yang meningkat di tahun 2022 mencapai 8,5 triliun sedangkan tahun 2021 hanya 7,6 triliun.⁶ Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan Papua belum optimal sehingga tujuan yang diharapkan pun belum tercapai.

² RPJP Kementerian PPN/Bappenas. Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) tahun 2005-2025. Halaman 34.

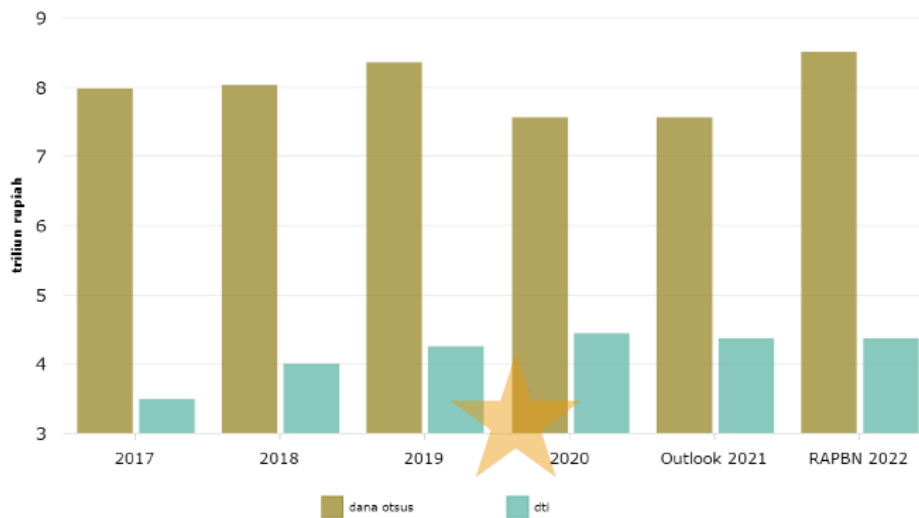
³ Lihat penjelasan Permen PPN/Bappenas No. 11 tahun 2020 tentang Renstra tahun 2020-2024.

⁴ UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 6.

⁵ Laporan Komando Daerah Militer XVIII/Kasuari Staf Perencanaan Data Bangunan Yang Dibangun Oleh Pemerintah Dan Belum Difungsikan Di Wilayah Kodam XVIII/Kasuari tahun 2021.

⁶ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/17/fokus-percepatan-pembangunan-dana-otsus-papua-meningkat>, diakses 30 Januari 2022 pukul 22.21 WIB.

Gambar 1.1: Dana Otsus Papua



Sumber: Kemenkeu, 2021

Berdasarkan hal diatas maka dapat dipahami bahwa tidak optimalnya Perencanaan Pembangunan di Papua karena belum baiknya sinergi antar pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan di Papua tersebut. Kondisi ini mengakibatkan pembangunan di Papua rawan penyalahgunaan wewenang. Sepanjang tahun 2021 sebanyak 33 pejabat pemerintah daerah terjerat kasus korupsi.⁷ Hal ini memperlihatkan bahwa Otda sangat berpotensi terjadinya tindakan korupsi jika tidak dirancang secara baik. Padahal jika melihat pembangunan yang dilaksanakan di beberapa daerah, ternyata Pemerintah Pusat dalam hal ini Bappenas memiliki andil cukup penting untuk menjadi *leading sector* serta menjamin pembangunan berjalan dengan baik. Adapun berbagai K/L sesuai tupoksinya ditunjuk untuk mampu menjalankan tugas-tugasnya agar mampu mewujudkan pembangunan yang diharapkan. Sedangkan Pemda dalam konteks ini tetap dilibatkan dalam proses pembangunan yang dijalankan.

Jika K/L terkait mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik tentu akan berdampak pada tercapainya percepatan pembangunan khususnya di wilayah Papua. Namun sangat disayangkan karena belum baiknya sinergi antar pemangku kepentingan dalam Perencanaan Pembangunan di Papua menyebabkan perencanaan pembangunan di Papua belum holistik. Adapun

⁷ Fabio Maria Lopes Costa dalam <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/12/27/33-orang-jadi-tersangka-korupsi-di-papua-sepanjang-2021>, diakses 31 Januari 2022 pukul 17.00 WIB.

beberapa persoalan lain juga perlu menjadi perhatian yakni pembangunan hanya diartikan pada lingkup fisik atau infrastruktur.⁸ Padahal sebagaimana diketahui pembangunan khususnya di wilayah Papua tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik tetapi juga non fisik, khususnya peningkatan kualitas SDM. Sejauh ini, kualitas SDM di wilayah Papua dapat dikatakan cukup tertinggal jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya sehingga kehadiran/migrasi masyarakat dari daerah lain di Papua menjadikan masyarakat Papua (Orang Asli Papua/OAP) rentan dieksploitasi dan kalah saing dalam mendapatkan pekerjaan yang membutuhkan pra-syarat tingkat pendidikan tertentu. Selain itu, banyaknya penolakan pembangunan infrastruktur dan kehadiran dari masyarakat non-Papua ke wilayah Papua dikarenakan adanya perbedaan nilai dan budaya yang signifikan dengan yang dianut masyarakat Papua, sementara kebanyakan masyarakat Papua belum terbekali secara matang untuk menerima/mentolerir kehadiran budaya dan nilai-nilai asing. Sehingga persoalan terkait kualitas SDM perlu menjadi perhatian serius dalam merencanakan program pembangunan di Wilayah Papua. Kemudian persoalan lainnya berkenaan masih tingginya ancaman dari kelompok-kelompok separatis yang kerap kali mengganggu ketentraman dan keamanan wilayah Papua sehingga berdampak pada instabilitas nasional dan menjadi tantangan untuk melakukan pembangunan daerah secara jangka panjang.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan terdapat beberapa permasalahan perencanaan pembangunan di Papua yang meliputi: (1) Kewenangan Pemda Papua dalam mengelola wilayah belum mampu mendorong percepatan di Wilayah Papua, hal ini diantaranya karena belum terbangunnya sinergi yang baik antara pemangku kepentingan di Papua sehingga rawan akan penyalahgunaan wewenang, (2) Pembangunan masih hanya diartikan dalam lingkup fisik dan infrastruktur, belum menyentuh pembangunan kualitas SDM, (3) Masih tingginya ancaman dari kelompok separatis dan konflik bersenjata sehingga menjadi tantangan untuk melakukan pembangunan jangka panjang. Dari persoalan-persoalan tersebut, penulis memandang perlu untuk mengkaji lebih lanjut yang dituangkan dalam sebuah judul “Optimalisasi Perencanaan Pembangunan

⁸ Mohammad Bernie dalam <https://tirto.id/masalah-papua-tak-selesai-cuma-dengan-membangun-jalan-egLa>, diakses 26 Januari 2022 pukul 23.21 WIB.

Papua Guna meningkatkan Ketahanan Nasional”. Hal ini menjadi penting karena pada dasarnya perencanaan dalam sebuah pembangunan merupakan proses awal yang perlu dibangun dengan sangat baik agar upaya pembangunan tersebut memiliki dampak strategis khususnya dalam mewujudkan ketahanan nasional.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang timbul dalam Taskap ini adalah ***“Bagaimana mengoptimalkan Perencanaan Pembangunan Papua Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional?”***. Adapun rumusan masalah tersebut diuraikan ke dalam tiga pertanyaan kajian yang akan dibahas dalam penulisan Taskap ini, yaitu:

- a. Bagaimana perencanaan pembangunan di Papua saat ini?
- b. Bagaimana membangun sinergi antar pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan di Papua?
- c. Bagaimana perencanaan pembangunan di Papua yang holistik guna menjaga ketahanan nasional?

3. Maksud dan Tujuan.

- a. **Maksud.** Secara umum maksud penulisan taskap ini yaitu memberikan gambaran dan menganalisis berbagai permasalahan mengenai perencanaan pembangunan di Papua, serta upaya membangun perencanaan pembangunan di Papua yang holistik guna meningkatkan ketahanan nasional.
- b. **Tujuan.** Taskap ini bertujuan untuk dijadikan sebagai pengembangan pengetahuan sekaligus bagian masukan konseptual maupun strategis kepada para pemangku kebijakan terkait perencanaan pembangunan di Papua yang holistik.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika Penulisan

- a. **Ruang Lingkup.** Taskap ini berfokus pada optimalisasi perencanaan pembangunan, yang diuraikan dalam ruang lingkup: perencanaan pembangunan di Papua saat ini, sinergi yang terbangun dalam

perencanaan pembangunan di Papua serta perencanaan pembangunan di Papua yang holistik guna menjaga ketahanan nasional.

- b. Sistematika penulisan.** Dalam penyusunan Taskap ini sistematika penulisan mengacu pada ketentuan Juknis Taskap Lemhannas tahun 2022 yang dituangkan kedalam sistematika penulisan sebagai berikut:

- 1) **Bab I Pendahuluan.** Pada bab ini dikemukakan berbagai gambaran perihal perencanaan pembangunan di wilayah Papua, dimana dalam perkembangannya kerap kali menghadapi berbagai persoalan sehingga menghambat terwujudnya cita-cita nasional. Bab ini juga menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan, metode dan pendekatan yang digunakan, serta beberapa pengertian yang berkaitan dengan penelitian.
- 2) **Bab II Tinjauan Pustaka.** Bab ini memuat dasar-dasar pemikiran penulis, yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Taskap, yaitu: peraturan perundang-undangan, kerangka teoritis, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan analisis tulisan ini.
- 3) **Bab III Pembahasan.** Bab ini menjelaskan mengenai gambaran subyek penelitian, hasil analisis data dan pembahasan penelitian yang meliputi perencanaan Pembangunan di Papua, sinergi antar pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan dan perencanaan pembangunan di Papua yang holistik guna menjaga ketahanan nasional.
- 4) **Bab IV Penutup.** Bab ini berisi simpulan dari keseluruhan pembahasan dan rekomendasi penulis terhadap kebijakan strategis mengenai variabel-variabel pembahasan.

5. Metode dan Pendekatan

- a. Metode.** Taskap ini menggunakan metode analisis kualitatif/deskriptif. Pengumpulan dan analisis penyajian data dan fakta dalam metode didasarkan pada pengalaman empiris penulis, penelitian literatur (studi kepustakaan) dari data sekunder dan/atau data primer.

- b. **Pendekatan.** Dalam penulisannya Taskap ini menggunakan pendekatan ketahanan nasional, mengkaji teori dengan analisis multi disiplin ilmu sesuai kerangka teoritis serta landasan hukum/regulasi yang relevan dengan variabel penelitian.

6. Pengertian

a. Pembangunan Nasional.

Serangkaian langkah-langkah strategis yang berkesinambungan dalam mewujudkan cita-cita nasional. Dalam pembangunan nasional pada dasarnya memiliki lingkup yang kompleks sehingga memerlukan upaya-upaya terukur agar langkah yang diambil mampu memberikan dampak positif dan mencakup seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.⁹

- b. **Program Pembangunan Nasional (PROGBANGNAS).** Rancangan kegiatan nasional untuk meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan sehingga mampu mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan keamanan.¹⁰ Sementara, **Program Pembangunan Daerah (PROGBANGDA)** merupakan rancangan kegiatan pada lingkup daerah yang didasarkan atas program nasional.¹¹

c. Ketahanan Nasional.

Kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi komponen-komponen sistem nasional yang digerakkan menuju pencapaian tujuan nasional atas berbagai tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang ada.¹²

d. Sistem Manajemen Nasional (Sismennas).

Suatu perpaduan dari tata nilai, struktur, fungsi, dan proses yang pada hakikatnya merupakan himpunan usaha untuk mencapai kehematan

⁹ Irawan Abdullah, 2010, Berpihak Pada Manusia: Paradigma Nasional, Pembangunan Indonesia Baru, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

¹⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

¹¹ Forum Peneliti Aceh. 2013. PANDUAN Pendampingan Perencanaan Pembangunan Daerah, CPDA, FPA, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan Bappeda Provinsi Aceh.

¹² Lemhanas RI. 2022. Bidang Studi Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional. Jakarta: Lemhanas RI.

(ekonomis), efisien, dan efektif sebesar mungkin dalam menggunakan sumber daya nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.¹³

e. Integrasi.

Proses penyatuan atas berbagai elemen berbeda sehingga menjadi kesatuan utuh. Proses penyatuan tersebut mencakup beberapa tahapan, diantaranya integrasi interpersonal, sosial dan budaya.¹⁴

f. Kerjasama.

Suatu proses yang dijalankan secara berkelompok dimana satu sama lain saling mendukung dan menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan kapasitas yang dimiliki sehingga mampu mencapai tujuan bersama.¹⁵

g. Optimalisasi.

Optimalisasi merupakan proses/usaha mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan efektivitas suatu sistem, seperti mengurangi biaya dan waktu proses, meningkatkan keuntungan, dan sebagainya.¹⁶



¹³ Lemhanas RI. 2022. Bidang Studi Sistem Manajemen Nasional. Jakarta: Lemhanas RI.

¹⁴ Soejono Soekanto. 1983. Kamus Sosiologi. Jakarta: Rajawali Press.

¹⁵ Lewis Thomas dan Elaine B. Johnson. 2014. Contextual Teaching Learning. Jakarta: Kaifa.

¹⁶ Sudaryantho Dannyanti. 2018. Optimalisasi Pelaksanaan Proyek dengan Metode PERT dan CPM (Studi Kasus Twin Tower Building Pasca Sarjana UNDIP), Disertasi, Universitas Diponegoro.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum.

Pada bagian ini menjelaskan perihal tinjauan peraturan dan perundang-undangan, serta tinjauan pustaka yang memiliki relevansi dengan variabel penelitian yang akan digunakan. Sub-bab kerangka teori dalam penelitian ini terdiri dari teori dan konsep yang relevan dengan pokok bahasan untuk menjawab pokok-pokok persoalan. Sedangkan Sub-bab tinjauan peraturan dan perundang-undangan digunakan sebagai landasan untuk memahami kebijakan dalam konteks variabel penelitian. Sementara Sub-bab tinjauan pustaka terdiri dari beberapa dokumen dan laporan sebagai data empiris dan landasan hukum untuk menguatkan fakta pada penelitian ini.

8. Peraturan Perundang-undangan.

- a. **Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.** Pasal 10 ayat 1 menjelaskan Pemda memiliki kewenangan dalam mengelola daerahnya sesuai dengan UU yang berlaku. Lebih lanjut ayat 2 menjelaskan Pemda menjalankan otonomi sesuai dengan aturan yang ada. Untuk itu pembagian kewenangan antara pusat dan daerah perlu dipahami dengan baik agar otonomi dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam upaya mempercepat terwujudnya pembangunan nasional. Sebagaimana hal ini diperuntukkan dalam memajukan pembangunan di Papua dimana pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah menjadi salah satu unsur yang perlu dipahami dan diatur dengan baik dengan mengacu pada regulasi yang ada.
- b. **Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.** Pasal 1 ayat 2 dijelaskan pembangunan nasional merupakan upaya yang

dilakukan secara kolektif oleh segenap komponen bangsa dalam mewujudkan cita-cita bersama. Kemudian pada ayat 2 pasal 1 diterangkan sistem perencanaan pembangunan nasional terbagi atas beberapa skala waktu, yaitu jangka pendek, menengah dan panjang dimana hal tersebut dilaksanakan oleh penyelenggara negara baik tingkat daerah maupun pusat dengan melibatkan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Regulasi ini memberikan pemahaman bahwa di dalam mewujudkan pembangunan khusus di Papua tentu membutuhkan perencanaan yang baik sehingga diperlukan upaya-upaya terukur melalui perencanaan agar mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Regulasi ini menjelaskan RPJP Nasional dibuat sebagai bagian dari perencanaan pembangunan dalam kurun waktu 20 tahun. RPJP Nasional merupakan bagian yang perlu dipahami dengan baik karena menjadi acuan di dalam penyusunan RPJP Daerah baik visi, misi dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana dijelaskan pada pasal 6 ayat 1. Perencanaan jangka panjang tersebut menjadi hal yang perlu dirancang dengan baik khususnya pada konteks ini terkait dengan rencana hingga 2045 dalam pembangunan Papua. Perencanaan dilakukan secara berjangka agar terlihat efektivitas dari perencanaan yang dibuat dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional.

d. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pasal 4 ayat 1 menjelaskan perihal kewenangan Pemerintah Papua yang terbatas pada lingkup politik luar negeri, moneter, agama dan peradilan serta kewenangan bidang lainnya yang telah

diatur pada PP. Regulasi ini perlu dipahami agar dapat diketahui batasan-batasan Pemda Papua dalam pengelolaan wilayahnya. UU ini secara khusus dirancang dalam mempercepat pembangunan khususnya di wilayah Papua, dimana hal tersebut sejalan dengan kebijakan Presiden dalam pembangunan Indonesia Timur salah satunya wilayah Papua.

e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Pasal 1 ayat 5 menjelaskan kewenangan Pemda Papua yang diberikan kewenangan dalam menentukan kebijakan dimana hal tersebut dilaksanakan sebagai penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan yang diberikan tersebut merupakan bagian dari implementasi otonomi daerah untuk mempercepat tercapainya pembangunan nasional. Regulasi ini erat kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan khususnya tingkat di daerah Papua yang menitikberatkan pada kewenangan dalam menentukan kebijakan dalam mempercepat pencapaian tujuan nasional.

f. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Pasal 1 ayat 1 menekankan bahwa RPJMN merupakan sebuah perencanaan yang dibuat sebagai acuan untuk 5 tahun kedepan (2020-2024). Dalam penyusunannya pada pasal 3 dijelaskan dimana Pemda dan K/L perlu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri terkait. Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan nasional memerlukan perencanaan yang matang, terukur dan jelas. Karenanya dibutuhkan perencanaan berjangka, utamanya pada konteks ini terkait dengan jangka menengah dimana dalam pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak seperti K/L terkait serta pihak-pihak lainnya yang dapat mendukung tercapainya tujuan nasional. Regulasi ini merupakan skema pada tingkat nasional yang

kemudian diterjemahkan dalam lingkup daerah khususnya di wilayah Papua.

- g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat.** Aturan ini merupakan langkah strategis yang diambil dalam mempercepat pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Keseriusan ini ditunjukkan dengan mengerahkan K/L untuk lebih berperan aktif didalam mendukung pembangunan wilayah tersebut sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk itu kebijakan khususnya ini hendaknya perlu dipahami secara baik karena dapat menjadi landasan dalam mewujudkan kesejahteraan Papua dengan berbagai sumber daya yang ada di wilayah tersebut.

- h. Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat.** Pembentukan tim koordinasi terpadu percepatan pembangunan kesejahteraan khususnya di Provinsi Papua dan Papua Barat seperti dijelaskan pada pasal 2 merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan masyarakat Papua yang maju, sejahtera, damai dan bermartabat dimana tim tersebut terdiri atas Dewan Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim khusus ini memiliki peran strategis di dalam mewujudkan pembangunan di wilayah Papua dengan pembagian tugas sesuai dengan kewenangannya yang telah diatur.

- i. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023.** RPJMD dalam konteks ini fokus pada pembangunan wilayah Papua untuk tahun 2019-2023 dimana penyusunannya didasarkan pada partisipatif, akuntabel, transparan, berkeadilan dan sebagainya dengan

mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dalam mendukung tercapainya pembangunan daerah khususnya di Papua. Untuk itu aturan terkait dengan pembangunan jangka menengah yang diperuntukkan pada wilayah Papua perlu menjadi perhatian bagi para pemangku kepentingan agar dapat dijadikan landasan dalam mencapai terwujudnya pembangunan daerah khususnya Papua.

9. Kerangka Teoritis.

a. Tinjauan Teori-teori

1) Teori Kebijakan.

Dunn (2003) menjelaskan istilah kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan secara terencana dan didasarkan pada analisis kritis untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Pada konteks bernegara, istilah kebijakan kerap kali digunakan oleh pemerintah di dalam mengambil keputusan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Untuk itu dalam memaknai kebijakan memerlukan berbagai pemahaman yang komprehensif terkait berbagai unsur yang ada karena sebagaimana dipahami aspek-aspek tersebut saling mempengaruhi sehingga diperlukan telaah yang baik agar kebijakan yang diambil sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini kebijakan dipandang perlu digunakan untuk membangun perencanaan yang baik khususnya wilayah Papua dengan mengoptimalkan segala potensi yang ada di wilayah tersebut agar mampu mempercepat tercapainya pembangunan.

2) Teori Pembangunan.

Mengacu pada teori yang dikemukakan Arief Budiman. (1995) dalam bukunya "Teori Pembangunan Dunia Ketiga", pembangunan pada dasarnya memiliki makna yang dinamis,

untuk itu dibutuhkan pemahaman yang komprehensif agar istilah pembangunan tidak diartikan secara parsial. Adapun teori pembangunan yang digunakan dalam hal ini yaitu pembangunan dunia ketiga, dimana teori ini berusaha menyelesaikan berbagai persoalan yang ada pada negara-negara di dunia khususnya negara berkembang seperti Indonesia yang didominasi oleh kekuatan ekonomi, IPTEK dan pertahanan negara-negara maju. Terkait dengan hal tersebut maka teori modernisasi merupakan teori yang menekankan bahwa faktor manusia dan nilai-nilai budaya sebagai persoalan dalam pembangunan. Lebih lanjut teori modernisasi memandang bahwa negara-negara miskin ataupun berkembang membutuhkan bantuan dari negara-negara maju untuk mempercepat pembangunan seperti keuangan, pendidikan dan teknologi. Jika berkaca pada konteks Indonesia dimana memiliki kekayaan alam namun belum mampu dimanfaatkan maka dapat diketahui bahwa Indonesia belum mampu keluar dari persoalan internal bangsa. Berdasarkan hal tersebut, maka teori pembangunan menjadi penting diperlukan terlebih dalam pembangunan daerah Papua agar mampu terwujud pemerataan dan pada akhirnya mendukung tercapainya ketahanan nasional.

b. Tinjauan Konsep.

1) Pendekatan Perencanaan Pembangunan Integratif

Alexader Abe (2002) dalam bukunya “Perencanaan Daerah Partisipatif” menjelaskan pendekatan perencanaan pembangunan integratif menekankan pada menyatukan berbagai unsur yang berbeda menjadi satu kesatuan pada suatu proses untuk mendukung kebijakan pencapaian pembangunan. Penjelasan ini memberikan pemahaman bahwa pendekatan ini menitikberatkan pada bangunan sinergi yang diarahkan agar mendapatkan keluaran yang sesuai diharapkan.

Melalui pendekatan perencanaan pembangunan integratif khususnya yang diperuntukkan pada pembangunan wilayah Papua tentu perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya terutama berkenaan dengan jalinan sinergi serta keterpaduan program terhadap pencapaian tujuan tertentu.

2) Pendekatan Perencanaan Pembangunan Holistik

Dalam sebuah perencanaan pada dasarnya perlu dilakukan pemahaman yang komprehensif agar membantu mencapai suatu tujuan. Pada konteks tersebut, maka perencanaan perlu menerapkan pendekatan holistik terlebih dalam lingkup merencanakan pembangunan. Pendekatan perencanaan pembangunan holistik merupakan sebuah upaya terukur dalam mencapai tujuan dengan mengutamakan skala prioritas atas program-program yang dilaksanakan dengan didukung oleh kerjasama K/L yang pihak-pihak terkait lainnya.¹⁷ Mengacu pada uraian tersebut, pendekatan perencanaan pembangunan holistik khususnya terkait dengan Papua perlu dipahami secara komprehensif dengan menekankan keterpaduan bagian-bagian terkait sehingga perencanaan yang dibangun mampu mencapai tujuan yang diharapkan khususnya dalam perspektif ketahanan nasional.

3) Program Pembangunan Nasional

Dalam lingkup Indonesia, program pembangunan nasional (Probangnas) merupakan penjabaran atas konstitusi yaitu UUD 1945 yang kemudian dirumuskan dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar, pedoman, dan tujuannya. Upaya pembangunan nasional secara garis besar diimplementasikan melalui RJPN,

¹⁷ *Ibid.*

dimana di dalamnya terdapat beberapa tahap RJMN.¹⁸ Probangnas yang di implementasikan merupakan pedoman bagi K/L pemerintah dalam menyusun rencana strategisnya (Renstra K/L) serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menyesuaikan rencana pembangunan di daerahnya.¹⁹ Dalam penelitian ini, konsep Probangnas digunakan untuk menganalisa perencanaan pembangunan wilayah Papua sehingga mampu mewujudkan ketahanan nasional. Untuk Probangnas yang dibangun perlu memperhatikan aspek-aspek terkait agar program yang disusun visioner dan mampu diimplementasikan dengan baik dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

4) Ketahanan Nasional.

Ketahanan Nasional atau Tannas merupakan kondisi ketangguhan dan keuletan suatu bangsa, yang ditunjukkan dengan kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka mengatasi dan menghadapi ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan (ATHG), baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang berpotensi membahayakan stabilitas nasional.²⁰

Sebagai sebuah sistem, ketahanan nasional mempunyai beragam karakteristik gatra yang saling terkoneksi dan berinteraksi satu sama lain. Sesuai dengan bentuk dari NKRI, setiap wilayah memiliki kandungan aspek trigatra, yaitu: geografi, demografi, dan SKA sebagai gatra statis. Terdapat pula Pancagatra yang menjadi pilar Tannas yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan.

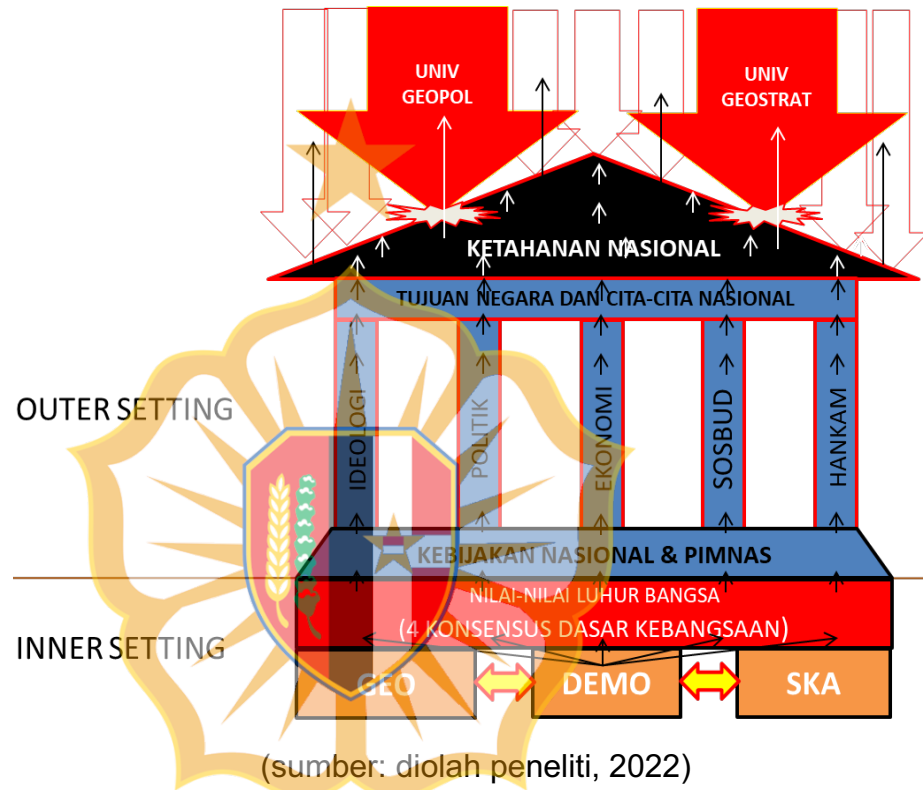
¹⁸ Pemerintah RI, Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN.

¹⁹ Kementerian PPN/Bappenas, 16 Juli 2017, Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan, tersedia di <https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/dokumen-perencanaan-dan-pelaksanaan/dokumen-rencana-pembangunan-nasional/rpjp-2005-2025/rpjm-2015-2019/> diakses 13 Maret 2022 pukul 12:12 WIB.

²⁰ *Loc., Cit., Lemhanas RI.*

Setiap gatra tersebut akan bersifat dinamis dan memiliki tingkat ketahanan yang berbeda-beda tergantung dari pembinaannya. Dimana dalam setiap ketangguhan gatra tersebut akan mendukung perwujudan tujuan negara dan cita-cita nasional.²¹

Gambar 2.1: Skema Konsep Ketahanan Nasional



Konsep ketahanan nasional dalam hal ini perlu dipahami dengan baik karena mencakup berbagai aspek kehidupan sehingga mampu mendukung terwujudnya pembangunan di wilayah Papua. Untuk itu maka segala sumber daya yang ada perlu dioptimalkan agar mampu mendukung tercapainya pembangunan di Papua.

5) Sistem Manajemen Nasional.

Sistem manajemen nasional atau disingkat Sismennas merupakan upaya dalam mewujudkan tujuan nasional melalui

²¹ *Ibid.*

perpaduan tata nilai, struktur, proses, dan fungsi yang merupakan himpunan dari usaha guna mencapai aspek ekonomis (kehematan), efisiensi (daya guna), dan efektivitas (hasil guna) semaksimal mungkin dengan cara pemanfaatan segala sumber daya dan sumber dana nasional. Keseluruhan proses yang memerlukan perlibatan pengambilan keputusan dan kewenangan disebut dengan sistem manajemen nasional.²² Dalam konteks penelitian ini, Sismennas akan difokuskan pada kebijakan dan program atas perencanaan pembangunan wilayah Papua dalam mewujudkan Tannas. Melalui Sismennas dapat membantu dalam membangun wilayah Papua dengan mekanisme yang terukur dan terencana dimana hal tersebut sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan nasional.

10. Data dan Fakta.

Taskap ini berfokus pada kondisi dan upaya dalam mengoptimalkan perencanaan pembangunan Papua guna meningkatkan ketahanan nasional yang didasari beragam data dan fakta terkait wilayah Papua dan perencanaan pembangunannya, meliputi:

a. Kondisi pembangunan Provinsi Papua

Beberapa indikator atas pembangunan daerah dapat terlihat pada pendidikan, kesehatan, sarana prasarana penunjang, hingga indeks kompositnya. Sejauh ini, dalam sepuluh tahun terakhir pembangunan di wilayah Papua belum menunjukkan kemajuan yang signifikan dimana indikator pembangunannya jika dilihat secara rata-rata cenderung berada pada peringkat relatif rendah jika dibandingkan dengan capaian pembangunan daerah-daerah lain di Indonesia. Bahkan, apabila mengacu pada data yang diambil dari *The World Bank* dan BPS pada tabel dibawah ini, beberapa capaian

²² Lemhannas RI. 2022. Bidang Studi Sistem Manajemen Nasional. Jakarta: Lemhannas.

pembangunan justru lebih rendah jika dilakukan perbandingan dengan sebelum era otonomi khusus atau Otsus.²³

Gambar 2.2: Peringkat Indikator Capaian Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat

Indikator	Provinsi	1996*	1999*	2006	2009	2016	2019
IPM	Papua	25 dari 26	25 dari 26	33 dari 33	33 dari 33	34 dari 34	34 dari 34
	Papua Barat			30 dari 33	30 dari 33	33 dari 34	33 dari 34
PDRB per kapita	Papua	5 dari 26	4 dari 26	8 dari 33	8 dari 33	7 dari 34	11 dari 34
	Papua Barat			7 dari 33	5 dari 33	6 dari 34	6 dari 34
Akses Listrik	Papua	25 dari 26	25 dari 26	32 dari 33	33 dari 33	33 dari 33	-**
	Papua Barat			31 dari 33	31 dari 33	31 dari 33	-**
Akses Sanitasi	Papua	24 dari 26	22 dari 26	27 dari 33	31 dari 33	31 dari 33	-**
	Papua Barat			29 dari 33	23 dari 33	25 dari 33	-**
Akses Air Bersih	Papua	19 dari 26	21 dari 26	31 dari 33	32 dari 33	32 dari 33	-**
	Papua Barat			25 dari 33	29 dari 33	24 dari 33	-**
APM (SMA sederajat)	Papua	23 dari 26	21 dari 26	31 dari 33	30 dari 33	34 dari 34	34 dari 34
	Papua Barat			27 dari 33	19 dari 33	16 dari 34	15 dari 34
% Kelahiran oleh Tenaga Medis	Papua			25 dari 33	29 dari 33	34 dari 34	-**
	Papua Barat	21 dari 26	19 dari 26	27 dari 33	26 dari 33	26 dari 34	-**

Sumber: Fatahillah, T. N., Ananda, C. F., & Prasetyia, F., 2021

Mengacu pada tabel tersebut, menunjukkan capaian yang signifikan setelah diapkannya otonomi khusus masih belum optimal. Idealnya, Pemda Papua yang diberikan kewenangan melalui Otsus dalam menentukan kebijakan dimana sebagai penyelenggaran pemerintahan dapat mempercepat tercapainya pembangunann daerah Papua. Regulasi Otsus seharusnya mempermudah Pemda Papua menentukan kebijakan dalam mempercepat pencapaian tujuan nasional. Namun kenyataannya apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya dan dalam tahun-tahun sebelumnya (sepaimana yang tergambaran tabel diatas) masih belum dapat dikatakan terdapat peningkatan. Mulai dari IPM, PDRB, hingga akses ke fasilitas dasar Papua dan Papua Barat masih cenderung berada pada peringkat akhir dibanding Provinsi lainnya yang tidak memiliki kewenangan Otsus.

²³ Fatahillah, T. N., Ananda, C. F., & Prasetyia, F. (2021). Dana otonomi khusus Papua, tingkat pembangunan daerah, dan kapasitas pajak. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(4), 345-359.

b. SDM

Dalam konteks perkembangan SDM masyarakat Papua dapat dikatakan cukup tertinggal dengan daerah Indonesia lainnya. Mengacu pada data Indikator Capaian Pembangunan Provinsi, peringkat pendidikan (dengan indikator lulusan SMA terbanyak) baik dari Provinsi Papua dan Papua Barat masih diperingkat ke 34 dan 30. Secara lebih luas, untuk melihat SDM Papua maka perlu dilihat Indek Pembangunan Manusia/IPM. Komposit dari IPM yang dijadikan indikator adalah terpenuhinya aspek-aspek dasar kehidupan manusia, yang mencakup: (1) umur panjang dan hidup sehat; (2) pengetahuan; dan (3) standar hidup layak. IPM ini dapat dijadikan standar untuk mengukur SDM Papua karena menjelaskan bagaimana masyarakat Papua terhadap akses akan hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Pada tahun 2020, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat telah berhasil mengalami peningkatan dan masuk ke dalam kategori provinsi dengan IPM sedang, meskipun jika dilihat secara keseluruhan kedua provinsi tersebut masih berada pada peringkat terbawah di antara provinsi-provinsi di Indonesia lainnya. Untuk melihat sejauh mana upaya peningkatan SDM Papua maka dapat dilihat implementasi dari Inpres No. 9 tahun 2020 dijelaskan bahwa program prioritas Pemerintah Papua yakni berkaitan dengan pembangunan manusia. Sejauh ini pemerintah tengah melakukan beberapa program prioritas untuk pengembangan SDM Papua, seperti:

- 1) Pendidikan, melalui program Papua Pintar, yang membutuhkan dukungan dari perguruan tinggi seperti Universitas Cenderawasih saat ini difokuskan sebagai Think Tank dalam membangun manusia Papua yang lebih baik.

- 2) Program Papua Sehat merupakan salah satu solusi atas permasalahan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Hal ini diharapkan untuk membantu mengurangi angka *stunting*.

c. Infrastruktur

Dari segi infrastruktur, Papua memang masih mengalami ketertinggalan yang signifikan. Langkah ini bertujuan agar mampu meningkatkan kesejahteraan sehingga mampu bersaing dengan wilayah-wilayah lainnya. Secara umum terdapat tujuh sektor strategis yang menjadi program *quick wins* 2021-2022 untuk membangun kesejahteraan masyarakat Papua:²⁴

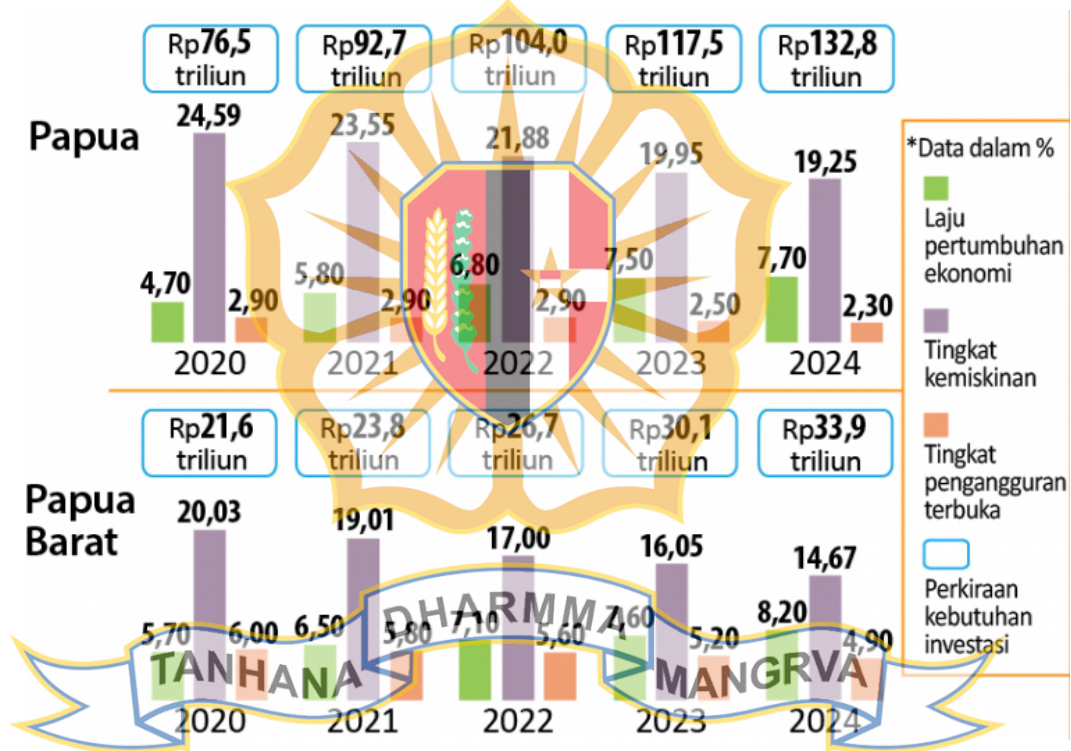
- 1) Program Papua Mandiri merupakan bentuk pengembangan keunggulan yang dimiliki mencakup daerah wisata serta pengembangan usaha masyarakat Papua.
- 2) Program Papua Tersambung sebagai upaya membangun jaringan komunikasi di Papua sehingga mampu membantu masyarakat di dalam komunikasi dan transportasi yang pada akhirnya mampu memberikan dampak positif terhadap kemajuan wilayah tersebut.
- 3) Program Papua Terang, merupakan langkah strategis yang dilakukan pemerintah dalam memberikan akses listrik keseluruh wilayah Papua. Disamping itu langkah ini sebagai bagian di dalam mengembangkan energi terbarukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.
- 4) Program Papua Berkarya merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memajukan manusia Papua agar dapat berkarya khususnya di industri nasional.

²⁴ <https://mediaindonesia.com/humaniora/413701/wapres-janjikan-7-program-prioritas-dalam-pembangunan-papua>, diakses 11 April 2022 pukul 19.25 WIB.

- 5) Program Papua Bangga terkait dengan yang memperkenalkan aspek sosial-budaya yang ada di wilayah Papua sehingga tidak hanya menjadi ciri khas tanah Papua namun juga sebagai kekuatan dalam membangun wilayah.

Secara garis besar, dalam kurun waktu 2020-2024, perencanaan pembangunan wilayah Papua akan berfokus pada infrastruktur dan perekonomian masyarakat, dengan target pembangunan sebagai berikut:²⁵

Gambar 2.3 Target Pembangunan 2020-2024



Sumber: Bappenas diolah Antaraneews, 2021.

11. Lingkungan Strategis.

Upaya mengoptimalkan perencanaan pembangunan Papua guna meningkatkan ketahanan nasional sangat dipengaruhi banyak faktor lingkungan strategis, baik dari lingkup global, regional maupun nasional.

²⁵ <https://www.antaraneews.com/infografik/1656662/pembangunan-papua-2020-2024>, diakses 14 Maret 2022 pukul 23.21 WIB.

Berikut uraian singkat dari lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan Papua berdasarkan faktor-faktornya:

- a. **Global.** Perencanaan pembangunan di tiap wilayah pastinya ditentukan oleh ekonomi global dan investasi dari negara lain. Hal tersebut dapat menjadi dukungan bagi perencanaan pembangunan di wilayah Papua. Namun, keterlibatan dan intervensi global juga perlu dibatasi dan diwaspadai, mengingat wilayah Papua merupakan wilayah yang kaya akan SDA dan rawan akan gerakan separatisme, sehingga banyak negara-negara yang ingin melakukan eksploitasi di tanah Papua. Maka, keterlibatan dari negara lain secara global dalam proses pembangunan, sangat ditentukan kemampuan diplomasi negara untuk mampu mengajak negara lain melakukan investasi, sekaligus membatasi kewenangannya.
- b. **Regional.** Pembangunan suatu negara, termasuk dalam lingkup daerah, sangat ditentukan oleh dinamika yang terjadi pada Kawasan (regional). Dalam konteks ini, Kawasan Asia Tenggara relatif stabil, belum memberikan pengaruh signifikan terhadap perencanaan pembangunan di wilayah Papua. Sehingga, jika pembangunan terutama dalam akses dan mobilitas sudah meningkat di wilayah Papua, pemerintah dapat membuka peluang ekspor dan impor yang lebih luas pada wilayah Papua dengan negara-negara ASEAN. Di sisi lain juga terdapat tantangan dari negara-negara Melanesia di Kawasan Asia Pasifik. Mayoritas negara-negara tersebut memberikan dukungan terhadap gerakan-gerakan separatis yang ada di Papua Barat. Bahkan, Fiji, Vanuatu, dan Australia kerap menyuarkan isu dugaan pelanggaran HAM di Papua pada saat sidang PBB. Tentunya hal ini menjadi hambatan bagi pembangunan yang dilakukan Indonesia di Papua karena

adanya desakan dan intervensi dari masyarakat internasional yang memiliki kepentingan khususnya dalam eksploitasi sumber daya Papua.

c. Nasional. Faktor yang terdiri dari kondisi lingkungan domestik/dalam negeri, sebagai berikut:

- 1) Geografi. Kondisi geografis yang dimiliki Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar mengakibatkan adanya perbedaan geografis yang signifikan antara kawasan perkotaan dan daerah terpencil, seperti di pegunungan, hutan dan laut, yang menjadi tantangan bagi Indonesia untuk membangun komunikasi, khususnya melalui koneksi internet. Termasuk di wilayah Papua yang merupakan pulau paling Timur di Indonesia. Sejauh ini, Provinsi Papua merupakan provinsi yang cukup tertinggal dibanding Provinsi lainnya. Terbatasnya komunikasi, khususnya akses jalan dan komunikasi (internet) mempengaruhi upaya mobilisasi dan komunikasi sosial dalam rangka pembangunan yang dilakukan pemerintah²⁶
- 2) Demografi. Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Papua sebanyak 4,3 juta jiwa. Tingginya angka populasi masyarakat tentu sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan dan kompleksitas dari rencana pembangunan di wilayah Papua.²⁷
- 3) Sumber Kekayaan Alam (SKA). Berhasil tidaknya suatu kebijakan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan erat dengan eksploitasi dan pemanfaatan SKA di wilayah tersebut. Wilayah Papua merupakan salah satu wilayah Indonesia yang memiliki

²⁶ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 27 Desember 2018, Pemerintah ungkap tantangan pembangunan infrastruktur internet, tersedia di https://kominfo.go.id/content/detail/12182/pemerintah-ungkap-tantangan-pembangunan-infrastruktur-internet/0/sorotan_media, diakses pada 13 Maret 2021 pukul 22.30 WIB.

²⁷ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/15/sensus-penduduk-2020-jumlah-penduduk-papua-tak-sampai-separuh-jakarta>, diakses pada 13 Maret 2022 pukul 22.40 WIB.

kekayaan alam yang melimpah, sehingga arah pembangunan di Wilayah Papua akan juga terpengaruh oleh kebijakan pemberdayaan dan eksploitasi SKA.

- 4) Ideologi. Di wilayah Papua, ancaman ideologi ditunjukkan dari adanya beberapa gerakan dari masyarakat yang menginginkan lepas dari NKRI (separatisme). Hal ini menunjukkan ideologi Pancasila cukup terkikis di Wilayah Papua. Tentunya kondisi tersebut sangat mempengaruhi arah perencanaan pembangunan.
- 5) Politik. Perencanaan pembangunan pada dasarnya ditentukan oleh putusan politik negara, baik pada tingkat pusat dan daerah. Maka apabila terdapat instabilitas politik di level Provinsi dan Kabupaten di Papua, perencanaan pembangunan di daerah juga akan terhambat.
- 6) Ekonomi. Pembangunan nasional tentunya di-*drive* oleh motif ekonomi. Dinamika ekonomi nasional dan regional juga mempengaruhi perencanaan pembangunan di wilayah Papua.
- 7) Sosial Budaya. Sosial budaya masyarakat Papua dapat menjadi dukungan akselerasi pembangunan jika pemerintah mampu secara baik mengkomunikasikan kepada masyarakat melalui pendekatan sosial budaya sehingga masyarakat terlibat aktif dalam pembangunan wilayahnya. Namun, jika terdapat resistensi dari masyarakat terkait sosial budaya yang kurang selaras dengan pemerintah, khususnya pemerintah pusat, maka sosial budaya juga dapat menjadi hambatan.
- 8) Hankam. Ancaman yang datang dari wilayah Papua adalah Kelompok separatisme teroris (KST). Sebelumnya, aparat melabeli kelompok separatis yang mempejuang kemerdekaan Papua sebagai Kelompok Kriminal

Separatis Bersenjata (KKSB), namun setelah terjadi penembakan Kepala BIN Papua dan semakin meningkatnya aksi, maka penyebutan KKSB menjadi KST. Tentunya, kehadiran dari KST ini merupakan salah satu faktor utama dalam penentu keberhasilan pembangunan. Dalam konteks wilayah Papua, pemerintah perlu terlebih dahulu atau setidaknya bersamaan mampu membangun sekaligus mengatasi ancaman hankam yang ditimbulkan oleh KST.



BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum.

Pada dasarnya pembangunan suatu daerah khususnya wilayah Papua merupakan sebuah proses yang perlu memperhatikan aspek-aspek terkait sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satunya didasarkan pada perencanaan yang dirancang dalam beberapa waktu. Hal ini bertujuan agar terdapat mekanisme terukur dan jelas di dalam membangun suatu wilayah yang dalam konteks ini yakni Indonesia Timur, Papua. Terkait dengan hal tersebut, pada bagian ini menjelaskan perihal: perencanaan pembangunan di Papua saat ini, sinergi antar-pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan di Papua dan perencanaan pembangunan yang holistik di Papua guna meningkatkan ketahanan nasional. Hal ini sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

13. Perencanaan Pembangunan di Papua saat ini

Pembangunan pada wilayah Papua yang selama ini telah berlangsung selama puluhan tahun masih belum menunjukkan hasil yang signifikan dibandingkan dengan Provinsi lainnya yang juga melaksanakan pembangunan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat persoalan dan tantangan yang masih harus dihadapi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Sejauh ini, penduduk yang mendiami di wilayah Papua, terutama Orang Asli Papua (OAP) yang merupakan pribumi, memiliki keterbatasan akses dalam pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*) seperti infrastruktur-infrastruktur dasar, akses terhadap air bersih, permukiman (hunian layak), sanitasi, rendahnya pendapatan, dan rendahnya akses terhadap layanan dasar untuk pendidikan dan kesehatan. Hal ini pun semakin kompleks karena masih kerap kali terjadi perang antar suku dan beberapa Gerakan separatisme yang mengakibatkan wilayah Papua tidak hanya sebagai daerah yang

tertinggal, tetapi juga rawan. Apabila kondisi ini terus dibiarkan, tidak hanya kesejahteraan bagi masyarakat Papua tidak terwujud maka pergerakan separatisme pun semakin kuat. Selain itu, potensi SDA yang berlimpah di wilayah Papua juga tidak akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejauh ini pemerintah memang sudah mencanangkan kebijakan terkait pembangunan sebagaimana yang tertera pada Pepres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM dimana poin utama dari Pepres tersebut adalah langkah-langkah pembangunan yang bersifat terobosan, terpadu, tepat, dan sinergi antar pihak-pihak yang terlibat. Untuk mewujudkannya maka pada tahun 2020 dicanangkan 5 Kerangka baru untuk pembangunan Papua yang disebut "*The New Framework for Papua*". Adapun uraian dari kerangka tersebut yaitu: (1) Percepatan pembangunan SDM unggul, inovatif, dan berkarakter; (2) Percepatan transformasi dan pembangunan ekonomi (3) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar; (4) Pelestarian kualitas lingkungan hidup; (5) Percepatan reformasi birokrasi dan upaya mewujudkan *good governance* atau tata kelola pemerintah yang baik.²⁸

Mengacu pada teori kebijakan, proses dari kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan secara terencana dan didasarkan pada analisis kritis untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dan dalam konteks bernegara; berkaitan dengan keputusan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, maka kerangka kebijakan tersebut memang sudah relevan dan perlu untuk diterapkan dalam perencanaan pembangunan di Papua. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu difokuskan lagi jika ingin melakukan pengoptimalan pembangunan Papua dengan segala macam polemiknya. Kebijakan ini perlu diimplementasikan dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk mengoptimalkan suatu solusi dalam rangka memilih solusi yang terbaik dari sekumpulan pilihan-pilihan solusi yang tersedia.

²⁸ Pemprov Papua, 2019, Ringkasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023, Ppaua: Pemprov Papua.

Sumber daya dalam konteks pembangunan Papua ini perlu digarisbawahi tidak hanya mencakup SDA melainkan juga SDM masyarakat Papua, khususnya OAP. Sejauh ini SDM masyarakat Papua cenderung cukup tertinggal dibandingkan dengan SDM di daerah Indonesia lainnya, sehingga hal ini mengakibatkan rentannya masyarakat asli Papua tereksplorasi di tanahnya sendiri dan menimbulkan kecemburuan sosial yang pada akhirnya berpotensi untuk menimbulkan konflik dan penolakan akan kehadiran pendatang, termasuk penolakan terhadap upaya pembangunan dalam jangka panjang yang dicanangkan dari Pemerintah Pusat.

Mengacu pada Indeks pembangunan manusia atau IPM di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat berdasarkan rentan waktu 10 tahun yang lalu (2010-2021). Rata-rata IPM di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat masih berada di angka 66%. IPM adalah indikator yang digunakan oleh negara-negara yang ada di dunia untuk melihat bagaimana dan sejauhmana suatu penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Jika dilihat dari tahun ke tahun memang terdapat peningkatan indeks pembangunannya, namun jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya dan rata-rata IPM Indonesia yang berada di angka 72%, maka IPM wilayah Papua dapat dikatakan cukup tertinggal. Maka dalam konteks kerangka perencanaan pembangunan Papua, pembangunan infrastruktur perlu dibarengi dengan pembangunan manusia, bahkan jika memungkinkan pembangunan manusia perlu dijadikan prioritas agar dalam proses pembangunan infrastruktur dalam skala besar dapat memanfaatkan SDM lokal. Menurut catatan penulis, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar lebih optimal, yaitu:

- a. Optimalisasi Perencanaan Pembangunan SDM khususnya pada OAP.

Dalam mengoptimalkan perencanaan pembangunan di Papua, maka perlu dimulai dari kesejahteraan masyarakatnya, khususnya pribumi setempat karena merekalah yang akan tinggal

dan membangun wilayahnya. Apabila, perencanaan pembangunan dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek tersebut, besar kemungkinan akan terjadi penolakan, kerusuhan, konflik, dan bahkan upaya pemisahan diri. Maka dari itu orientasi perencanaan pembangunan perlu diarahkan dengan peningkatan kesejahteraan terlebih dahulu, terutama masyarakat OAP. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan ini harus memperhatikan aspirasi, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat setempat dengan menggunakan pendekatan persuasif yang sesuai dengan budaya dan adat masyarakat setempat. Penyusunan perencanaan pembangunan ini juga harus diimplementasikan dengan menjadikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat setempat sebagai dasar dan tetap menghormati hak-hak adat masyarakat Papua.

Kunci dari perencanaan pembangunan agar lebih berorientasi pada SDM khususnya OAP dapat dimulai dengan menciptakan akses-akses fasilitas publik yang lebih inklusif agar dapat dipergunakan masyarakat Papua dari berbagai kalangan. Di sisi lain, untuk masyarakat Papua yang masih memiliki keterbatasan akses untuk menjangkau fasilitas publik tersebut, misalnya keterbatasan dalam mobilisasi, terbatasnya akses jalan, dan tempat tinggal yang masih di tengah hutan, dan sebagainya, maka sudah sewajarnya pemerintah yang memfasilitasi dan menstimulus agar dapat diakses.

Secara teknisnya, pembangunan yang berpusat pada SDM dapat difokuskan pada penyediaan pendidikan yang bermutu, terjangkau, dan inklusif dengan ketersediaan fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar yang memadai sebagaimana wilayah Indonesia lainnya. Dari segi pelayanan Kesehatan, perlu menciptakan pelayanan dan fasilitas Kesehatan yang berkualitas, murah, dan mudah untuk diakses OAP. Dari segi pembangunan karakter, perlu untuk menciptakan kemandirian perekonomian

masyarakat melalui beragram program pelatihan dan keterampilan. Hal ini perlu diiringi dengan peningkatan mental spiritual yang mencakup nasionalisme, kesadaran bernegara, bela negara (kepatuhan pada aturan). Program-program tersebut juga perlu dijalankan dengan upaya penciptaan ketahanan pangan yang lebih Tangguh bagi seluruh wilayah Papua.

b. Optimalisasi Perencanaan Pembangunan pada Pertumbuhan dan Potensi Unggulan Sumber Daya Alam (SDA).

Perencanaan Pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan dan potensi unggulan SDA di wilayah Papua merupakan hal yang mutlak agar perencanaan pembangunan optimal dan tepat sasaran. Maka, perlu dipahami dan diteliti terlebih dahulu sektor-sektor unggulan dan potensi di Papua yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Papua secara signifikan. Hal ini diperlukan karena salah satu kunci dari keberhasilan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata, sehingga dalam konteks ini dampak pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama OAP.

Kebijakan pembangunan ekonomi ini tidak semata hanya mengejar pertumbuhan dalam bentuk angka, namun yang paling penting adalah dampak dari pertumbuhan itu dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua. Prinsip pembangunan dalam konteks ekonomi di Papua ini dapat dilakukan melalui program-program seperti: Perubahan Pola Pikir, Pengwilayahan Komoditas, serta Tanam, Petik, Olah dan Jual. Perubahan pola pikir yang dimaksud adalah masyarakat Papua khususnya OAP perlu ditingkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mengelola Sumber Daya lokal disekitarnya sehingga bernilai ekonomis untuk memenuhi kebutuhannya dan sekaligus meningkatkan ekonomi di daerahnya. Sementara Pengwilayahan Komoditas dalam konteks ini diartikan sebagai prioritas pengembangan ekonomi daerah yang

berdasarkan komoditas unggulan di wilayah Papua. Sementara program Tanam, Petik, Olah dan Jual yang dimaksud adalah menyiapkan sistem pemasaran terintegrasi yang dimulai dari masa panen, pasca panen, hingga tahap pemasaran/penjualan.

c. Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Lingkungan Kewilayahan dan Penataan Ruang

Orientasi yang berlandaskan pemerataan dan keadilan dalam konteks ini adalah upaya penyediaan infrastruktur yang memadai di wilayah Papua dengan tujuan utama menyediakan akses yang inklusif bagi masyarakat Papua untuk menghilangkan ketimpangan dengan wilayah lainnya yang dilakukan dengan prinsip keadilan pembangunan antar-wilayah. Hal ini dilakukan dengan berfokus pada peningkatan kualitas SDM masyarakat asli Papua agar dapat memiliki daya saing, memiliki tingkat pendidikan minimum untuk pekerjaan di level manajerial/strategis, dan menciptakan budaya yang lebih terbuka/toleran di masyarakat Papua untuk menerima kehadiran masyarakat Indonesia yang memiliki budaya berbeda dari daerah lainnya.

Secara teknisnya, dapat dilakukan dengan pengembangan wilayah dan penyediaan infrastruktur sosial dengan tujuan utama untuk menciptakan pelayanan kemandirian kampung, dengan berlandaskan Rencana Tata Ruang. Hal ini juga perlu dibarengi dengan upaya pembangunan dalam bidang ekonomi yang merata dan berkeadilan yang dapat dilakukan dengan program-program seperti perbaikan distribusi pendapatan, perbaikan pemerataan pendapatan antar-daerah, perbaikan kesenjangan antar-kampung, sehingga terjadinya proses afirmasi bagi OAP. Sementara dalam sektor sosial, pemerataan dan keadilan dapat dilakukan dengan program-program seperti perbaikan akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kebebasan berpolitik, serta pemerataan berbasis gender.

d. Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Keamanan Berbasis Kearifan Lokal

Pada dasarnya unsur keamanan dalam suatu negara menjadi sangat penting untuk dibangun secara baik agar tercipta suasana aman dan tentram bagi masyarakatnya. Dalam kasus Papua, sebagaimana diketahui keamanan merupakan hal yang belum dapat diwujudkan dengan baik karena masih adanya kelompok-kelompok yang mengganggu sehingga menimbulkan instabilitas daerah. Untuk itu maka diperlukan suatu mekanisme atau cara yang transformatif yakni dengan membangun perencanaan pembangunan keamanan berbasis kearifan lokal, dimana masyarakat Papua tidak hanya dijadikan objek dalam pembangunan namun juga subjek sebagai pelaku aktif untuk berkontribusi dalam membangun keamanan wilayahnya. Hal ini sebagai contoh dapat dilakukan melalui program wilayah Papua Tangguh dengan melibatkan masyarakat secara aktif atas pembangunan keamanan Papua. Selain itu, perencanaan pembangunan juga perlu melibatkan musyawarah Forkopimda Papua sehingga segala bentuk gangguan yang ada dapat diminimalisir dengan bekerjasama dengan perwakilan/representatif dari kelompok masyarakat itu sendiri dan pada akhirnya terwujud keamanan yang diharapkan.

14. Sinergi antar-pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan di Papua.

Perencanaan pembangunan sebagaimana diketahui merupakan sebuah proses panjang yang mencakup berbagai aspek serta keterlibatan pihak-pihak terkait sehingga perlu dilakukan sebaik-baiknya. Kondisi ini perlu dipahami karena perencanaan pembangunan memiliki andil besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah Papua. Perihal sinergi yang terbangun dengan pihak-pihak terkait di dalam perencanaan pembangunan pada hakikatnya mengacu pada

regulasi yang ada, seperti UU No. 25 tahun 2004 pasal 1 ayat 2 yang menerapkan pembangunan nasional dilakukan oleh segenap komponen bangsa dalam upaya mencapai tujuan bersama. Adapun kewenangannya juga diatur di dalam UU No. 32 tahun 2004 perihal pemerintah daerah dimana menekankan atas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Keseriusan dalam membangun Papua melalui jalinan kerjasama diperkuat dengan Inpres No. 9 tahun 2020 yang intinya berupaya mempercepat pembangunan di Papua.

Berkenaan dengan hal di atas Bappenas menjelaskan perihal belum baiknya sinergi yang terbangun dalam pembangunan Papua belum sepenuhnya berjalan dengan baik sehingga beberapa target yang ada belum mampu tercapai.²⁹ Karena dibutuhkan upaya-upaya konstruktif agar sinergi yang terbangun antar pihak-pihak terkait semakin solid dan kuat sehingga mampu mendukung tercapainya tujuan yang diharapkan. Kondisi ini perlu dipahami karena sinergi merupakan bentuk kerjasama yang terbangun oleh pihak-pihak lain dimana di dalam hubungan tersebut saling mengisi dan mendukung sehingga mampu mendapatkan hasil yang lebih baik.³⁰ Untuk itu pada pelaksanaannya maka diperlukan pemahaman yang baik agar mampu menjalankan masing-masing tugasnya sesuai dengan tupoksi yang ada dalam mewujudkan perencanaan pembangunan Papua yang ideal.

Mengacu pada teori sinergi, yang berupa konsep hubungan kerjasama yang terbangun sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan, maka terdapat beberapa hal yang perlu dimiliki untuk mewujudkan/menciptakan sinergitas yaitu; orientasi hasil yang lebih baik, subjek-subjek yang saling melengkapi, adanya kesepakatan diantara semua pihak yang terlibat, dan sebagai suatu proses yang dijalankan bersama. Maka, mengacu pada ketentuan pra-kondisi untuk menciptakan sinergitas tersebut, upaya menyinergikan para pemangku kepentingan

²⁹ <https://deskpapua.bappenas.go.id/berita/detail-berita/catatan-konferensi-memandang-papua-20-tahun-ke-depan-hari-kedua-pentingnya-sinergi-pembangunan-papua>, diakses 18 April 2022 pukul 23.21 WIB.

³⁰ *Ibid.*

dalam perencanaan pembangunan di Papua, dapat diuraikan dalam kebijakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan keterlibatan pihak-pihak terkait baik Pemerintah Pusat dan Daerah, swasta, dan khususnya OAP dalam menyusun Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP). Disamping itu juga rencana tersebut harus dapat memberikan ruang kepada generasi muda yang nantinya akan berkiprah 20 tahun mendatang. Langkah ini perlu direalisasikan dengan menerapkan pendekatan multidimensional agar perencanaan yang dibuat mampu memberikan dampak positif terhadap Papua kedepan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni dengan meningkatkan forum kepemudaan seperti Karang Taruna yang langsung dibina oleh Kemensos dan kegiatan kepemudaan daerah lainnya yang dibina dan difasilitasi Pemda. Hal ini perlu dilakukan agar unsur pemuda mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah Papua.
- b. Secara khusus sinergi dalam perencanaan pembangunan harus menerapkan pendekatan sosial-kultural yang mengedepankan pada hak-hak masyarakat Papua. Karena selama ini implementasi Otsus belum berjalan baik mengingat peran pusat terlalu dominan dalam pengelolaan Papua. Padahal jika melihat semangat Otsus yakni memberikan kewenangan kepada daerah dalam memajukan wilayahnya seharusnya dapat dilaksanakan dengan optimal agar mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Musyawarah warga dan pertemuan berkala Forkopimda Papua dengan pemerintah pusat menjadi salah satu upaya yang perlu dikembangkan dalam proses pembangunan. Melalui upaya ini diharapkan akan tumbuh rasa untuk dilibatkan dalam pembangunan daerah Papua.
- c. Meningkatkan keterlibatan Perguruan Tinggi dengan mengembangkan vokasi terapan yang sesuai dengan keunggulan daerah dimana hal ini juga perlu ditopang dengan

tenaga pendidik yang kompeten serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Pelibatan Perguruan Tinggi dalam perencanaan pembangunan di Papua merupakan hal yang perlu dilakukan. Pihak akademisi pada konteks ini dapat memberikan sumbangsihnya atas berbagai telaah penelitian yang dilakukan sehingga mampu terbangun perencanaan yang sesuai dengan karakteristik wilayah Papua dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Peran Perguruan Tinggi menjadi penting dimaksimalkan dimana Litbang yang dilakukan juga perlu melibatkan warga Papua khususnya yang mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi sehingga hasil kegiatan riset yang dilakukan dapat merepresentasikan kepentingan dari masyarakat Papua itu sendiri, terutama OAP.

- d. Meningkatkan kerjasama serta kemitraan dengan pemerintah pusat serta K/L terkait lainnya dalam pengembangan wilayah Papua. Sinergi yang terbangun dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan transformasi wilayah Papua yang dilakukan dengan melanjutkan upaya peningkatan jaringan infrastruktur terintegrasi dan terpadu sehingga mampu mendukung pembangunan wilayah, mengoptimalkan komoditas yang ada di wilayah Papua seperti perkebunan, hutan, peternakan dan sebagainya dengan menerapkan sistem teknologi yang tepat guna, mendukung hilirisasi industri dalam mendukung tercapainya pembangunan daerah, pengembangan kawasan yang ada di wilayah Papua dengan berfokus pada pembangunan fasilitas publik sehingga mampu memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya, membangun forum kerjasama yang mendasarkan pada karakteristik masyarakat di Papua serta meningkatkan investasi agar mampu berdampak pada daya saing wilayah tersebut dan meningkatkan kepastian hukum atas

hak tanah sehingga mampu menopang program-program yang dicanangkan dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

- e. Sinergi atau kerjasama yang terbangun juga perlu diwujudkan dalam sebuah kesepakatan bersama dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) dimana hal ini sangat berguna sebagai acuan pelaksanaan atas program-program yang telah disusun. Selain itu bentuk kesepakatan ini sebagai wujud meningkatkan komitmen oleh pihak-pihak terkait dalam mencapai tujuan yakni mewujudkan pembangunan wilayah Papua. Kerjasama ini salah satunya dalam membangun perencanaan berjangka pendek, menengah dan panjang sehingga pengelolaan daerah Papua dalam peningkatan kehidupan masyarakatnya dapat benar-benar tercapai.
- f. Pemerintah pusat perlu pro-aktif untuk melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Papua untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Papua terutama OAP. Hal ini perlu dilakukan tidak hanya ketika dalam konteks pembangunan besar, namun juga dalam kebijakan-kebijakan pemerintah di Papua secara umum agar meminimalisir adanya penolakan dan membangun kepercayaan bersama untuk menghindari adanya konflik sosial. Secara teknisnya hal ini dapat dilakukan dengan pertemuan rutin Pemerintah Pusat, Forkopimda Papua, dan perwakilan masyarakat OAP yang dilakukan dalam konteks sosialisasi, seminar, dan program-program sosial sebagainya dengan tujuan utama menciptakan sinergitas di semua pihak. Hal ini juga perlu diiringi dengan program bersama pihak Forkopimda untuk meningkatkan kualitas SDM OAP dan membekali dengan kemampuan/keahlian terampil agar memiliki daya saing yang kuat. Maka, ketika sinergitas pada tingkat pimpinan tersebut sudah terbangun, maka koordinasi pembangunan dalam jangka panjang pun akan lebih optimal.

g. Membangun transformasi digital dalam mendukung pembangunan daerah Papua. Berbagai kegiatan pemerintahan perlu menerapkan penggunaan teknologi secara aktif dan bijak karena sebagai bentuk transparansi serta menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Melalui transformasi digital diharapkan segala kegiatan dalam pemerintahan khususnya terkait dengan sinergi yang terbangun dalam perencanaan pembangunan di Papua dalam benar-benar terbangun dengan baik. Transformasi digital yang dimaksud adalah perubahan yang berkaitan dengan penerapan/implementasi teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tahap transformasi untuk konteks pembangunan Papua ini adalah tahap menggunakan proses digital yang memungkinkan terbentuknya inovasi dan kreativitas dalam suatu produk digital tertentu. Kehadiran transformasi digital bukan hanya menggantikan metode sebelumnya, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari metode tradisional. Program-program pembangunan transformasi digital ini tidak hanya berfokus pada penyediaan akses dan fasilitas untuk tersambung ke internet agar lebih inklusif, tetapi juga perlu diiringi dengan edukasi terkait literasi digital.

h. Meningkatkan sinergi dalam perencanaan pembangunan dengan pihak-pihak terkait sebagai bentuk konsolidasi demokrasi. Hal ini perlu dilakukan mengacu pada tupoksi pada masing-masing lembaga atau kementerian yang terlibat dan berkoordinasi dengan kelompok masyarakat sehingga perencanaan yang ada mampu mencapai tujuan yang diharapkan yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua.

i. Memaksimalkan sinergitas dalam level *grass root* atau lini terkecil di masyarakat. Pada dasarnya, program-program sinergi perencanaan adalah upaya untuk menciptakan pembangunan

Papua yang tepat, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua. Namun, selama ini kebijakan mensinergitaskan perencanaan pembangunan hanya berada pada level strategis, belum menyentuh pada tingkat-tingkat teknis dan operasional. Maka, sangat dibutuhkan program partisipatif yang menstimulus keterlibatan masyarakat dan institusi tingkat daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan. Adapun salah satu cara yang perlu dilakukan membuat sistem perencanaan partisipatif yang mengedepankan dua institusi atau layanan dasar tingkat daerah yaitu kesehatan dan pendidikan (Puskesmas dan Sekolah Dasar). Sejauh ini, tidak hanya di Papua, tetapi juga seluruh Indonesia layanan dasar kerap membuat perencanaannya sendiri-sendiri sehingga program-program yang berjalan tidak memiliki dampak besar dan menjangkau sedikit partisipan. Bahkan, seringkali tidak melibatkan masyarakat setempat dalam proses perencanaannya sehingga sasarannya kurang tepat dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Maka, pendekatan melalui program-program di Puskesmas dan Sekolah merupakan proses pembangunan yang paling relevan mengingat berada ditataran *grass root* dan meng-cover isu-isu yang paling krusial di masyarakat kelas menengah dan menengah bawah, yaitu pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan hal di atas maka sinergi yang terbangun akan mengoptimalkan proses perencanaan pembangunan agar mendapatkan *output* yang diharapkan. Secara konseptual optimalisasi merupakan upaya yang perlu dimaksimalkan sehingga mendapatkan nilai terbaik.³¹ Sehingga, upaya yang krusial perlu dimaksimalkan dalam konteks Papua yang rawan konflik dan disintegrasi saat ini adalah menciptakan sinergitas, baik dalam tingkat masyarakat dengan pemerintah daerah, maupun pimpinan-pimpinan daerah Papua dengan Pemerintah Pusat.

³¹ *Ibid.*

Untuk itu sinergi atas pihak-pihak terkait menjadi salah satu hal penting yang perlu diperkuat agar mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal serta mampu memanfaatkan sumber daya di Papua tanpa adanya penolakan dalam rangka mewujudkan pembangunan Papua yang lebih baik.

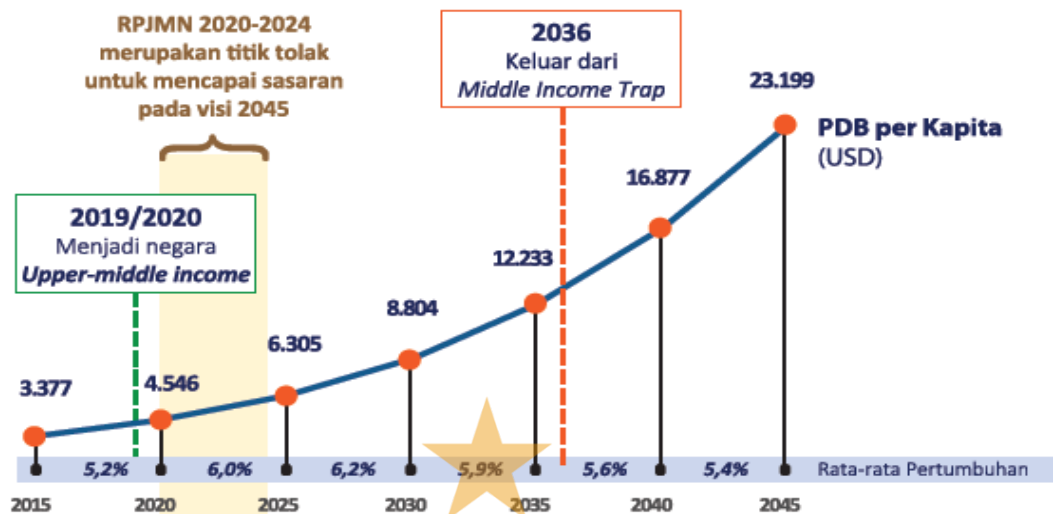
15. Perencanaan pembangunan yang holistik di Papua guna meningkatkan Ketahanan Nasional

Mengacu pada visi Indonesia 2045 yang berorientasi pada penguatan ekonomi dalam mencapai pembangunan manusia dan IPTEK, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan,³² dimana kesemuanya merupakan hal yang perlu dipahami secara baik agar dapat menjadi acuan di dalam menyusun perencanaan rentan waktu tersebut. Sebagaimana orientasi mewujudkan ketahanan nasional, maka perencanaan pembangunan holistik juga perlu diarahkan dan difokuskan dengan mempertimbangkan ATHG. Sejauh ini perencanaan pembangunan dilakukan dalam rentang/periode pada tahun 2025-2045 dimana terbagi atas perencanaan jangka menengah per lima tahun. Jika melihat RPJMN 2020-2024 dapat diketahui fokus pada transformasi ekonomi sebagai landasan menuju pada Indonesia Maju. Hal ini dapat tergambar sebagai berikut:



Gambar 3.1: Target Pertumbuhan Ekonomi Menuju Indonesia Maju

³² Lihat Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045.



Sumber: RPJMN 2020-2024

RPJMN tersebut merupakan acuan dalam penyusunan rencana pembangunan yang dilaksanakan wilayah atau daerah khususnya Papua, dimana hal tersebut merupakan konsekuensi atas sistem desentralisasi yang diterapkan dalam mendukung percepatan pembangunan secara nasional. Mengacu pada teori perencanaan yang berkaitan dengan pembangunan sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang baik, maka dibutuhkan usaha sadar, tersusun dan berkelanjutan dalam memilih pilihan terbaik untuk mencapai tujuan dari pembangunan tersebut.³³ Hal ini memberikan pemahaman bahwa perencanaan diartikan sebagai sebuah upaya terukur yang dilakukan dimana hal tersebut berkaitan dengan hal-hal terkait yang perlu diperhatikan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan ketentuan teori tersebut, maka pembangunan yang holistik di Papua guna meningkatkan Ketahanan Nasional tidak hanya perlu dilakukan melalui pengoptimalan perencanaan pembangunan dalam jangka pendek dan menengah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, namun perlu juga untuk dirumuskan dalam beberapa tahap/periode (pembangunan jangka panjang) yang dilakukan secara berkelanjutan. Adapun secara

³³ Nursini. (2010). Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Daerah Teori Dan Aplikasi, diakses <https://core.ac.uk/download/pdf/77629914.pdf>

teknisnya dapat dilakukan dengan empat tahap yang dimulai dari tahun 2025 hingga 2045, dengan uraian tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap I 2025-2029, meningkatkan kapabilitas dan kualitas manusia di wilayah Papua. Berdasarkan laporan BPS tahun 2021 terlihat bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) khususnya di wilayah Papua hanya 60,62%, dimana hal ini didasarkan pada beberapa aspek seperti pendidikan dan kesehatan.³⁴ Melihat kondisi tersebut tentu diperlukan upaya strategis dalam bentuk perencanaan pembangunan tahap I yang fokus pada peningkatan kualitas manusia. Pembangunan SDM diharapkan mampu mewujudkan manusia unggul, berbudaya dan menguasai IPTEK. Berkenaan dengan hal tersebut, maka perencanaan yang dapat dilakukan diantaranya:

- 1) Meningkatkan taraf dan kualitas pendidikan masyarakat Papua secara merata sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan di Papua. Pendidikan pada dasarnya merupakan hal mendasar yang perlu dibangun oleh suatu negara khususnya dalam konteks ini pemerintah daerah agar mampu memiliki SDM yang memiliki kemampuan dalam mewujudkan tujuan nasional. Karenanya pendidikan harus diselenggarakan dengan menjunjung nilai-nilai budaya yang ada pada Papua serta segala potensi yang ada sehingga sumber daya tersebut dapat dioptimalkan untuk dikembangkan dalam upaya mencapai kesejahteraan. Pendidikan berbasis multikulturalisme merupakan salah satu upaya yang dapat diterapkan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Papua dimana pendidikan tersebut mengusung nilai-nilai yang ada di daerah sehingga mampu tumbuh dan

³⁴ [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/04/indeks-pembangunan-manusia-papua-naik-tipis-jadi-6062-pada-2021#:~:text=Indeks%20Pembangunan%20Manusia%20\(IPM\)%20Papua%20\(2016%2D2021\)&text=Itu%20tercermin%20dengan%20Indeks%20Pembangunan,2019%20yang%20sebesar%2060%2C84, diakses 19 April 2022 pukul 15.21 WIB.](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/04/indeks-pembangunan-manusia-papua-naik-tipis-jadi-6062-pada-2021#:~:text=Indeks%20Pembangunan%20Manusia%20(IPM)%20Papua%20(2016%2D2021)&text=Itu%20tercermin%20dengan%20Indeks%20Pembangunan,2019%20yang%20sebesar%2060%2C84, diakses 19 April 2022 pukul 15.21 WIB.)

berkembang sehingga diharapkan mampu beradaptasi dan bersaing dengan kelompok masyarakat lainnya ditengah dinamika yang berkembang.

Gambar 3.2: Kesenjangan Pendidikan di Indonesia



Sumber: BPS, 2020

- 2) Mengoptimalkan nilai-nilai kebudayaan dalam pembangunan. Sebagaimana diketahui bahwa Papua merupakan salah satu wilayah yang kental atas nilai-nilai budaya dimana hal tersebut dipegang teguh dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu berbagai upaya dalam pembangunan manusia harus didasarkan atas kebudayaan yang hidup di masyarakat Papua sehingga segala kegiatan yang dilaksanakan lebih konkret dan jelas sesuai dengan budaya setempat. Sebagai contoh nilai-nilai budaya perlu diinternalisasi dalam kebijakan yang dibangun pemerintah seperti melibatkan masyarakat Papua, khususnya OAP secara aktif atas program yang dijalankan sehingga kearifan lokal yang ada secara tidak langsung akan terjaga.
- 3) Meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Papua. Saat ini tingkat kesehatan masyarakat Papua masih tergolong rendah sehingga berdampak pada kualitas hidup masyarakatnya. Belum terbangunnya kesehatan dan

ditambah lagi dengan terbatasnya sarana prasarana kesehatan yang mendukung kesehatan bagi masyarakat Papua menjadi penyebab kondisi kesehatan masyarakat rendah. Disamping itu pola hidup sehat yang belum mampu diterapkan menjadikan kesehatan warga di daerah Papua semakin memprihatinkan. Berdasarkan hal tersebut maka sudah seharusnya dibangun peningkatan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Papua yang diharapkan akan berdampak pada meningkatnya kapabilitas manusia di wilayah Papua dalam pembangunan nasional. Dalam hal ini salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan membumikan kembali program “Nusantara Sehat” melalui pengadaan sarana prasarana pendukung serta kesiapan tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan hingga ke daerah terpencil yang masih sulit untuk diakses di wilayah Papua agar masyarakat dapat lebih sehat. Tentu hal tersebut dengan menerapkan pola hidup sehat sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

- 4) Peningkatan lptek dalam mendukung pembangunan wilayah Papua. Di era modern saat ini lptek merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan karena mampu membantu dalam melaksanakan suatu pekerjaan, sehingga berdampak pada kualitas hidup masyarakat Papua. Saat ini penggunaan lptek sedang digencarkan khususnya di wilayah Papua dengan pembangunan infrastruktur pendukung sehingga mampu menopang tercapainya tujuan pembangunan daerah Papua. Untuk itu kedepan tidak hanya melakukan peningkatan lptek namun juga kemampuan menggunakannya agar masyarakat Papua dapat lebih cerdas dan bijak dalam memanfaatkan perkembangan teknologi sehingga mampu memberikan

dampak positif bagi kemajuan masyarakat. Salah satunya dengan menerapkan model *triple helix* dengan memperkuat kemitraan tiga pihak, yakni pemerintah, industri, perguruan tinggi/lembaga dalam penerapan iptek untuk kemajuan bersama.

- 5) Reformasi ketenagakerjaan. Wilayah Papua terkenal sebagai daerah yang masyarakatnya tergantung dengan pemanfaatan kekayaan alam. Dalam mendukung pembangunan daerah sudah selayaknya dilakukan pengembangan pekerjaan dengan tetap menjaga kelestarian alam sehingga dengan demikian mampu mendukung terwujudnya cita-cita nasional. Langkah ini sebagai bentuk reformasi dalam ketenagakerjaan agar terbangun ekspansi khususnya dalam berbagai pekerjaan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua yang selama ini tertinggal dengan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia.

- b. Tahap II 2030-2034, pengembangan potensi sumber daya dalam peningkatan ekonomi wilayah Papua. Secara nasional kondisi ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh 3,69%, dimana hal ini juga diikuti dengan ekonomi di daerah khususnya Papua yang tumbuh 15,11 persen (c-to-c).³⁵ Tren positif ini tentu perlu terus dijaga konsistensinya bahkan dikembangkan sehingga perbaikan secara ekonomi Papua semakin baik. Dalam pengembangan potensi sumber daya yang ada dalam peningkatan ekonomi, maka dapat dibangun perencanaan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Investasi dan Perdagangan Luar Negeri. Dalam pengembangan potensi sumber daya untuk mampu meningkatkan ekonomi wilayah Papua pada hakikatnya membutuhkan sumber daya finansial yang tidak sedikit.

³⁵ BPS. 2021. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2021. No. 12/02/94/Th. XV, 7 Februari 2022.

Untuk itu perlu perencanaan terukur salah satunya melalui peningkatan investasi khususnya dalam konteks ini diperuntukkan dukungan luar negeri. Dengan adanya aliran investasi diharapkan Papua dapat lebih mampu meningkatkan potensi yang ada sehingga akan berdampak pada kemajuan daerah.

- 2) Membangun industri dan pariwisata berbasis kearifan lokal. Dalam peningkatan ekonomi Papua dilakukan melalui mengembangkan industri dan pariwisata yang ada di wilayah tersebut dimana hal ini dilaksanakan dengan didasarkan pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Sebagai wilayah yang memiliki kekayaan atau sumber daya melimpah maka sudah seharusnya pembangunan Papua ditekankan pada mengoptimalkan potensi yang ada dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional. Salah satu program “Membangun Ekosistem Desa Wisata Bersama Komunitas”. Langkah tersebut perlu dilakukan sebagai bagian dalam memajukan wilayah Papua khususnya pariwisata berkearifan lokal.

- 3) Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya hampir seluruh wilayah Indonesia termasuk Papua memiliki potensi pertanian yang dapat dikembangkan karena sebagian besar wilayah dikategorikan sebagai daerah subur. Saat ini wilayah Papua cenderung identik dengan daerah pertambangan. Untuk itu perencanaan pembangunan kedepan perlu untuk memaksimalkan potensi sumber daya yang ada melalui pengembangan ketahanan pangan sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya secara mandiri serta mampu berkembang agar mampu berkontribusi pada pemenuhan atas daerah-daerah lainnya. Dengan demikian hal ini dapat berdampak pada terwujudnya kesejahteraan

masyarakat Papua yang lebih baik. Upaya hilirisasi pangan merupakan salah satu program yang dapat dilakukan dalam mewujudkan ketahanan pangan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi atas sumber daya yang ada dan memberdayakan SDM lokal dengan menstimulus dan memfasilitasi agar mampu meningkatkan produktivitas hasil pangan.

- 4) Membangun ketahanan energi yang merata di tanah Papua. Salah satu ciri dari pembangunan nasional dapat diketahui dari ketahanan energi yang terbangun. Saat ini Papua belum dimaksimalkan sumber daya yang ada dalam peningkatan ketahanan energi padahal sebagai wilayah yang strategis, Papua dapat menjadi alternatif khususnya untuk pengembangan energi terbarukan. Hal ini cukup beralasan karena krisis energi yang sedang terjadi hendaknya menjadi peluang bagi Indonesia khususnya wilayah Papua dalam membangun ketahanan energi seperti *green energy* atau energi hijau terkait dengan tenaga surya, angin, air, dan geothermal. Dengan terbangunnya ketahanan energi diharapkan mampu menjadi pendorong dalam mencapai tujuan nasional. Untuk itu perlu membangun energi baru terbarukan (EBT) dimana hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam mewujudkan ketahanan energi nasional.

- 5) Komitmen terhadap lingkungan hidup. Kerusakan lahan yang terjadi di Papua akibat eksploitasi berlebih berakibat pada kerusakan lingkungan. Data menunjukkan penyebaran lahan kritis yang terjadi di wilayah Papua secara tidak langsung berdampak pada tatanan kehidupan masyarakatnya. Untuk itu maka diperlukan pengelolaan alam berbasis kelestarian lingkungan dimana

pembangunan yang dilakukan harus sesuai dengan AMDAL yang telah diatur Undang-undang yang berlaku.

Gambar 3.3: Luas dan Penyebaran Lahan Kritis di Papua



Sumber: KLHK, 2017

Melihat kondisi luas dan penyebaran lahan kritis di Papua yang demikian, maka perlu dibangun perencanaan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup melalui: pencegahan kerusakan lingkungan agar memiliki dampak panjang untuk generasi dimasa depan, pemulihan atas kerusakan lingkungan yang tercemar sehingga diharapkan mampu dimanfaatkan kembali, penguatan kelembagaan atas pelanggaran yang terjadi khususnya terkait dengan pengrusakan lingkungan hidup di Papua, memberikan edukasi secara masif dan komprehensif kepada masyarakat serta pihak-pihak lain yang ingin memanfaatkan kekayaan alam di Papua dan membangun sistem pengawasan terpadu dalam upaya menjaga lingkungan alam Papua.

- c. Tahap III 2035-2039, pada tahap ini terkait dengan pemerataan pembangunan khususnya bagi masyarakat Papua. Saat ini pembangunan di Papua terus dilakukan sebagai upaya

mempercepat terwujudnya tercapainya tujuan melalui berbagai langkah strategis seperti pembangunan infrastruktur dengan harapan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah. Namun demikian harus diakui bahwa antara ketimpangan masih sangat terlihat sebagai contoh beras 10 kg di kawasan Korowai mencapai Rp. 2 juta.³⁶ Jika dibandingkan dengan wilayah lain seperti Jawa tentu harga tersebut sangat mahal sehingga dengan demikian maka upaya-upaya dalam mewujudkan pemerataan pembangunan menjadi hal penting yang perlu dilakukan pada rentan waktu tahap III perencanaan pembangunan Papua. Pemerataan pembangunan masyarakat Papua merupakan hal yang dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pengentasan kemiskinan secara terstruktur dan berkelanjutan. Apabila mengacu pada hasil analisa yang dilakukan Pemerintah Provinsi Papua tahun 2020 menunjukkan bahwa kemiskinan di Papua masih terjadi seperti hal ini berdampak pada kesenjangan masyarakat antara desa dan kota. Untuk itu langkah terukur seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Bantuan Pendidikan dan lain sebagainya perlu dimassifkan agar memiliki dampak strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Berknaan dengan kondisi kemiskinan di Papua dapat tergambar dibawah ini:

Tabel 3.3: Indikator-Indikator Kemiskinan Di Provinsi Papua Maret 2015 – Maret 2019

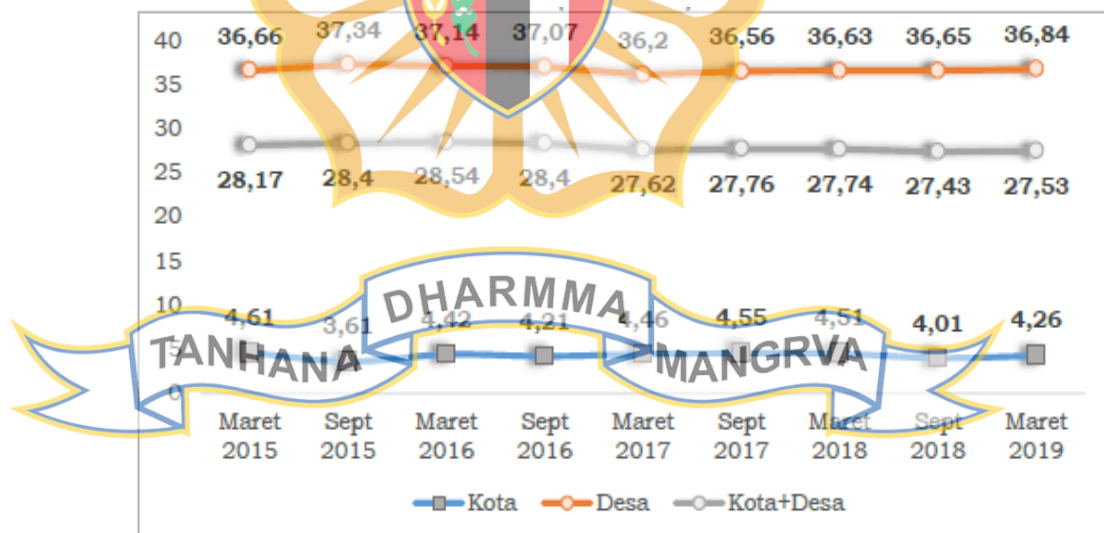
³⁶

<https://regional.kompas.com/read/2020/07/04/19210081/potret-ketimpangan-pembangunan-di-papua-beras-10-kg-seharga-rp-2-juta?page=all>, diakses 19 April 2022 pukul 21.21 WIB.

Tahun	Bulan	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita / Bulan)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Percentage Penduduk Miskin
2015	Maret	402.031	8.82		28.17
	September	406.385	9.25		28.40
2016	Maret	427.176	9.37	4.19	28.54
	September	440.021	7.43	2.65	28.40
2017	Maret	457.541	7.49	2.82	27.62
	September	464.056	6.24	1.93	27.76
2018	Maret	499.463	6.73	2.28	27.74
	September	518.811	5.91	1.82	27.43
2019	Maret	540.099	7.17	2.60	27.53

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2019

Gambar 3.4: Tingkat Kemiskinan Menurut Wilayah Di Provinsi Papua Maret 2015 – Maret 2019 (dalam %)

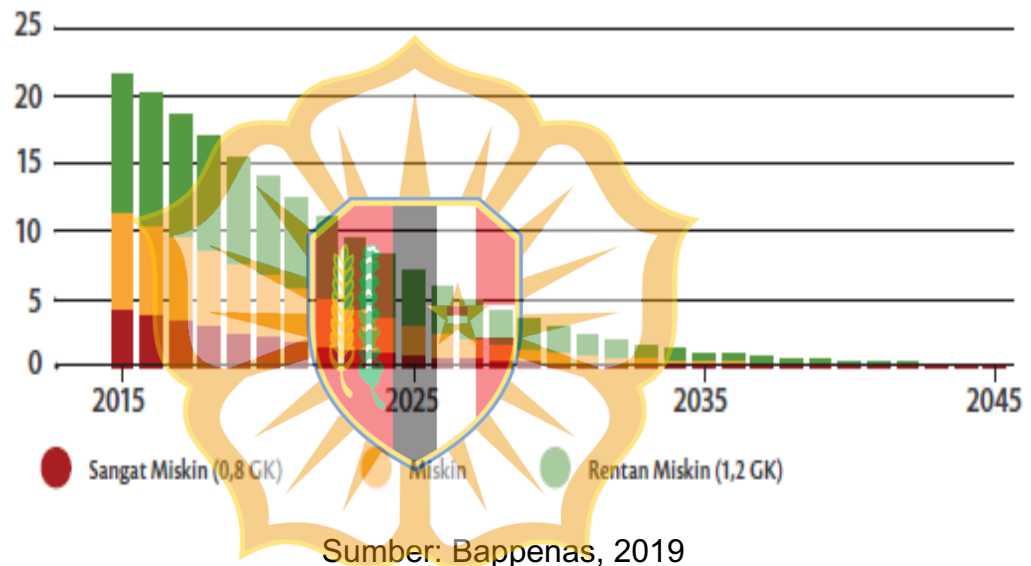


Sumber: BPS Provinsi Papua, 2019

Berdasarkan hal di atas maka perencanaan yang dapat dilakukan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan bagi masyarakat Papua, mempermudah kepemilikan aset dalam mendukung kemajuan ekonomi,

mengembangkan potensi usaha kreatif dan prospektif dalam upaya peningkatan pendapatan, membuat kebijakan yang mendukung pemerataan dan pengentasan kemiskinan serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam memajukan daerah Papua. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan pada tahun 2045 tingkat kemiskinan semakin menurun dan pemerataan pendapatan akan terwujud.

Gambar 3.5: Proyeksi Tingkat Kemiskinan



- 2) Pemerataan pembangunan wilayah Papua. Saat ini dimasa pemerintahan Presiden Joko Widodo konsen untuk melakukan pembangunan khususnya wilayah Timur Indonesia. Langkah strategis ini untuk menekan ketimpangan yang selama ini terjadi antara Jawa dan Luar Jawa. Mengacu pada ringkasan Bappenas, 2019 dijelaskan arah pengembangan daerah terutama Papua difokuskan pada "Basis Pangan Nasional & Sektor Ekonomi Berbasis SDA".³⁷ Hal ini didasarkan karena

³⁷ Ibid.

wilayah Papua merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang sangat potensial atas kekayaan alam yang ada di dalamnya sehingga perlu dioptimalkan dengan sebaik-baiknya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan membangun *food estate* dengan berbasis pada kelestarian lingkungan seperti beberapa wilayah lain di Indonesia. Langkah ini perlu dilakukan tidak hanya agar Papua dapat berdikari atas pangannya (kemandirian pangan), tetapi juga turut berkontribusi dalam memenuhi pangan nasional sehingga pada akhirnya mampu mempercepat tercapainya pembangunan.

- 3) Meningkatkan Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur. Pembangunan pada dasarnya memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai agar mampu mendukung tercapainya tujuan yang diharapkan. Dalam konteks ini perencanaan pembangunan Papua kedepan diarahkan agar mampu meningkatkan konektivitas fisik dan virtual sehingga mampu mendukung percepatan tercapainya tujuan, mendukung pembangunan kota dan desa secara merata sehingga dapat meminimalisir ketimpangan. Hal ini juga merupakan bagian dari mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah serta membangun *early warning system* terhadap bencana alam yang mungkin terjadi karena sebagaimana diketahui Papua merupakan salah satu wilayah yang rentan terhadap bencana. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan membangun sarana prasarana pendukung dalam mendeteksi bencana dimana alat tersebut dipasang pada tempat-tempat strategis dan rawan akan bencana agar mampu mengantisipasi bencana yang mungkin saja terjadi. Penggunaan alat atau sensor tersebut juga perlu didukung

dengan kesiapan atas kemampuan SDM yang memadai agar lebih optimal.

- d. Tahap IV 2040-2045, terkait dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih untuk terwujudnya ketahanan nasional. Pemerintahan ada sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita nasional. Untuk itu keberadaannya perlu dikelola dengan sebaik-baiknya melalui mekanisme terukur yang didukung rancangan yang jelas. Berdasarkan laporan APBN terlihat bahwa laporan keuangan Papua 38,5% kabupaten/kota berstatus wajib dengan pengecualian.³⁸ Lebih lanjut dalam hal *monitoring Center for Prevention* KPK, Papua memiliki skor 34% atau terendah kedua di Indonesia. Mengacu pada kondisi tersebut, maka perlu adanya beberapa upaya terukur yang fokus pada pengelolaan pemerintahan agar berdampak pada kualitas hidup masyarakat Papua secara luas. Hal ini sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas demokrasi dalam negeri. Salah satu yang perlu dipahami dalam kehidupan demokrasi yaitu menjalankan amanat rakyat sebagaimana diatur di dalam konstitusi. Untuk itu kualitas demokrasi akan dapat terwujud jika dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kepentingan rakyat dan "bukan" kepentingan partai atau kelompok sehingga dengan demikian akan terbangun tatanan kehidupan demokrasi yang lebih sehat dan berkeadilan. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun pendidikan politik pada lembaga-lembaga pendidikan baik formal, non formal maupun informal sehingga kualitas demokrasi di wilayah Papua semakin baik, tentu hal tersebut perlu menyesuaikan dengan kondisi adat dan budaya masyarakat sekitar.

³⁸ <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/600fd974ea589/potret-kelemahan-tata-kelola-pemerintahan-papua-dan-papua-barat>, diakses 18 April 2022 pukul 22.22 WIB.

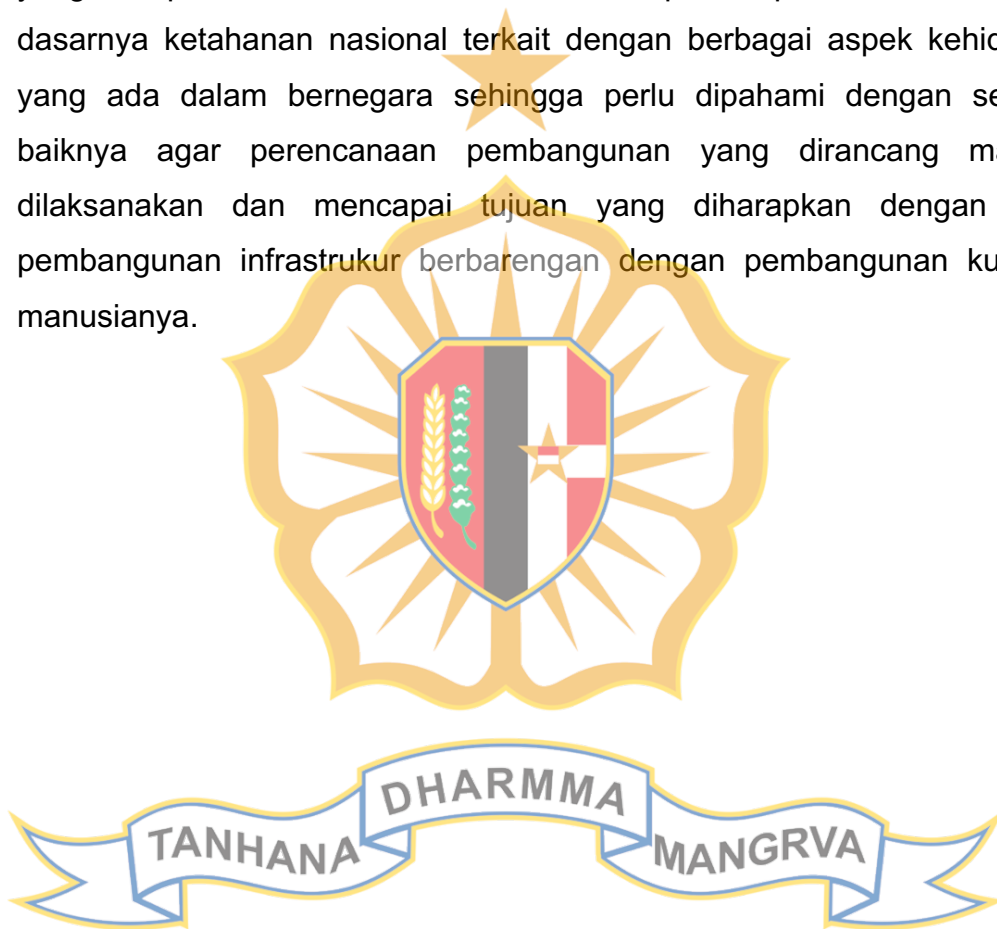
- 2) Penerapan reformasi birokrasi dan kelembangan yang kuat. Persoalan birokrasi yang berbelit atau prosedural nampak harus segera diakhiri dengan membangun penguatan kelembagaan dimana hal ini untuk mewujudkan atau mencapai kepentingan publik. Untuk itu perencanaan pembangunan khususnya wilayah Papua tahun 2045 didorong agar lebih memperkuat kelembagaan yang adaptif serta responsif; tata kelola inklusif dan berbasis teknologi sebagai bentuk penyesuaian dan transparansi; dan ASN yang mampu berfikir kreatif, inovatif, berpikir kritis dan global, beretos tinggi serta mampu serta proaktif di dalam memberikan pelayanan kepada publik. Langkah-langkah ini diharapkan mampu mendukung terwujudnya pembangunan Papua. Penerapan birokrasi yang dimaksud dapat dilakukan dengan membangun sistem satu pintu dalam pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi yang ada sehingga mampu mendukung terwujudnya *good governance*. Secara bertahap, seiring dengan perkembangan teknologi dan peningkatan kualitas, pola birokrasi di Papua juga perlu disiapkan untuk sistem *e-government*.

- 3) Penegakan Hukum dan pemerintahan daerah yang bersih dari korupsi. Pembangunan hukum diarahkan bagi terwujudnya masyarakat berbudaya hukum melalui penegakan hukum yang berkualitas dan berlandaskan HAM, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penguatan sistem hukum nasional melalui penataan regulasi. Pada tahun 2045, hukum warisan kolonial sudah digantikan seluruhnya oleh hukum nasional. Pencegahan dan pemberantasan korupsi diarahkan bagi terwujudnya masyarakat anti korupsi khususnya di pemerintahan

daerah Papua melalui perbaikan sistem di semua lini layanan publik; penguatan integritas masyarakat, penegak hukum, penyelenggara negara; serta penguatan sistem pencegahan korupsi. Hal ini tentu perlu diwujudkan dengan *political will* pemimpin daerah dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih. Untuk itu pemerintah perlu menempatkan SDM yang memiliki kualifikasi yang sesuai sehingga *clean governance* dapat terwujud. Hal ini diperlukan dalam mendukung bangunan sistem yang ada agar dapat sejalan dengan tujuan yang diharapkan.

- 4) Meningkatkan pertahanan-keamanan wilayah Papua agar menjadi daerah yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakatnya. Dinamika ancaman yang semakin berkembang menjadi salah satu hal mendasar dibangunnya pertahanan dan keamanan khususnya di Papua. TNI-Polri beserta pihak-pihak lainnya dituntut untuk mampu mewujudkan ketentraman bagi seluruh masyarakat. Karena hal tersebut sangat berdampak pada upaya-upaya lainnya dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah Papua. Untuk itu diperlukan pendekatan multidimensional dengan tidak hanya berkaitan dengan penggunaan senjata namun juga perlu menerapkan pendekatan sosial-budaya agar persoalan yang terjadi di Papua dapat lebih tertangani dengan baik. Sebagai contoh TNI-Polri perlu untuk meminimalisir menggunakan penggunaan senjata ketika melakukan pengamanan dan mulai membuka atau membangun ruang dialog secara berkala melalui forum membangun pertahanan-keamanan wilayah dengan masyarakat Papua dimana hal tersebut merupakan wujud mendukung pencapaian pembangunan daerah.

Berdasarkan hal-hal di atas dapat dipahami bahwa salah satu tujuan yang dicapai dalam perencanaan pembangunan yaitu terwujudnya ketahanan nasional, dimana sebagaimana diketahui ketahanan nasional memiliki berbagai aspek terkait yang perlu dipahami secara baik. Adapun aspek-aspek yang dimaksud yaitu geografi, demografi, SKA, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Dalam kaitannya tersebut maka perencanaan pembangunan pada konteks ini mengacu pada gatra yang ada pada ketahanan nasional. Hal ini perlu dipahami karena pada dasarnya ketahanan nasional terkait dengan berbagai aspek kehidupan yang ada dalam bernegara sehingga perlu dipahami dengan sebaik-baiknya agar perencanaan pembangunan yang dirancang mampu dilaksanakan dan mencapai tujuan yang diharapkan dengan pola pembangunan infrastruktur berbarengan dengan pembangunan kualitas manusianya.



BAB IV

PENUTUP

16. Simpulan

Perencanaan pembangunan pada hakikatnya merupakan sesuatu yang perlu dirancang dengan sebaik-baiknya karena berdampak pada tercapainya tujuan nasional. Adapun perencanaan pembangunan khususnya wilayah Papua yang ada saat ini dinilai belum mampu membawa ketertinggalan daerah tersebut dari daerah lainnya. Hal ini disebabkan karena belum terbangunnya sinergi yang baik antara pemerintah daerah, pusat dan pihak-pihak terkait lainnya. Kondisi ini tentu sangat mengganggu dalam upaya mencapai pembangunan daerah Papua karena sebagaimana diketahui upaya pembangunan memerlukan keterlibatan berbagai pihak sehingga memerlukan jalinan hubungan yang baik. Kemudian persoalan lainnya terkait dengan pembangunan yang dibuat kurang terencana dengan baik, seperti pada kenyataannya banyaknya proyek yang tidak berjalan dan bahkan kurang dapat dimanfaatkan sehingga tujuan pembangunan daerah Papua belum tercapai. Disisi lain, kondisi SDM di wilayah Papua yang cukup tertinggal dibanding daerah lainnya membuat masyarakat Papua memiliki daya saing untuk mendapatkan pekerjaan di tanahnya sendiri cenderung lebih rendah ketimbang masyarakat yang datang dari daerah lain. Selain adanya perbedaan budaya dan nilai yang signifikan, hal ini juga menjadi salah satu faktor penolakan kehadiran dan pembangunan di Papua.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa perencanaan pembangunan Papua yang dilaksanakan masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan sehingga perlu pemahaman yang komprehensif agar penyusunan rencana pembangunan mampu dilaksanakan secara optimal. Terkait hal tersebut terdapat tiga pokok pembahasan perencanaan pembangunan di wilayah Papua dalam taskap ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- a. Terkait perencanaan pembangunan di Papua, maka perlu untuk: (1) Optimalisasi Perencanaan Pembangunan SDM khususnya pada OAP (2) Optimalisasi Perencanaan Pembangunan pada Pertumbuhan dan Potensi Unggulan Sumber Daya Alam (SDA) (3) Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Lingkungan Kewilayahan dan Penataan Ruang.
- b. Terkait sinergi antar-pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan di Papua, maka perlu untuk menciptakan sinergitas, baik dalam tingkat masyarakat dengan pemerintah daerah, maupun pimpinan-pimpinan daerah daerah Papua dengan Pemerintah Pusat. Untuk itu sinergi atas pihak-pihak terkait menjadi salah satu hal penting yang perlu diperkuat agar mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal.
- c. Terkait Perencanaan pembangunan yang holistik di Papua guna meningkatkan Ketahanan Nasional, maka tidak hanya perlu dilakukan melalui pengoptimalan perencanaan pembangunan dalam jangka pendek dan menengah, namun perlu juga untuk dirumuskan dalam beberapa tahap/periode (pembangunan jangka panjang) yang dilakukan secara berkelanjutan.

16. Rekomendasi

Berdasarkan data dan fakta yang telah dianalisis dengan teori, tinjauan pustaka, peraturan perundang-undangan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi, maka penulis merekomendasikan beberapa kebijakan dan upaya yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak khususnya di dalam mengoptimalkan perencanaan pembangunan Papua guna meningkatkan ketahanan nasional, berikut rekomendasinya:

a. Terkait perencanaan pembangunan di Papua:

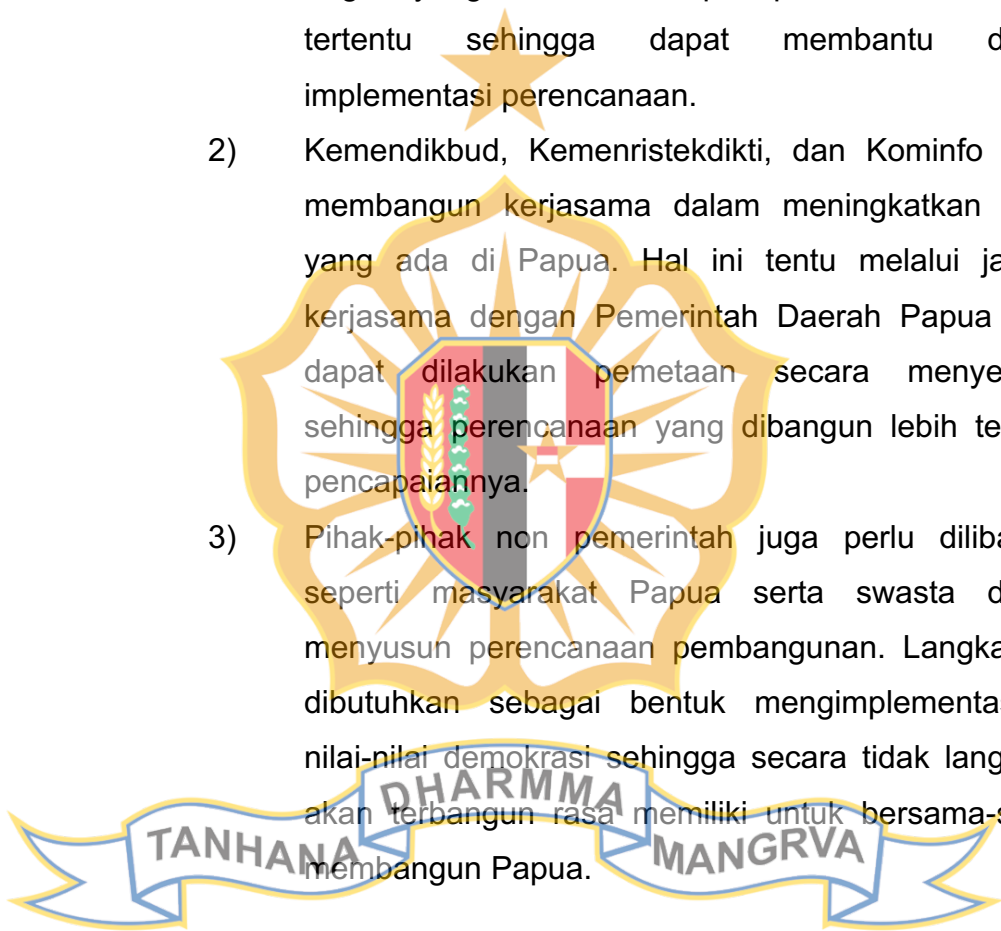
- 1) Presiden perlu mengambil langkah strategis dengan menjadi kontrol utama atas pembangunan di Papua sehingga pembangunan wilayah Indonesia Timur tersebut mampu dilaksanakan secara optimal.
- 2) Pemerintah Daerah Papua perlu melakukan pengkajian dengan melibatkan K/L terkait dalam perencanaan pembangunan dengan mengacu pada kebijakan pusat. Hal ini dibutuhkan agar perencanaan yang dibuat memiliki dampak positif terhadap kemajuan Papua.
- 3) Pemerintah Pusat perlu menyusun perencanaan pembangunan yang difokuskan pada pembangunan SDM yang berlandaskan Pemerataan, Keadilan, dan Pembangunan Kewilayahan khususnya bagi OAP.

b. Terkait sinergi antar-pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan di Papua

- 1) Pemerintah pusat perlu pro-aktif untuk melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Papua untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Papua terutama OAP.
- 2) Bappenas bekerjasama dengan KPK dalam konteks ini dapat berperan untuk melakukan pengawasan secara terpadu dan terintegrasi agar mampu meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kewenangan atas anggaran yang ada dalam upaya pembangunan wilayah Papua.
- 3) Kemenkeu, Kemenkop UKM, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) perlu menjalin koordinasi dalam upaya mempercepat pembangunan wilayah Papua.

c. Terkait Perencanaan pembangunan yang holistik di Papua guna meningkatkan Ketahanan Nasional

- 1) Bappenas, Pemerintah Daerah Papua, dan pihak-pihak terkait lainnya perlu membuat *roadmap* yang jelas perihal pembangunan wilayah Papua dimana hal tersebut dapat dijabarkan secara detail atas target-target yang hendak dicapai pada rentan waktu tertentu sehingga dapat membantu dalam implementasi perencanaan.
- 2) Kemendikbud, Kemenristekdikti, dan Kominfo perlu membangun kerjasama dalam meningkatkan SDM yang ada di Papua. Hal ini tentu melalui jalinan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Papua agar dapat dilakukan pemetaan secara menyeluruh sehingga perencanaan yang dibangun lebih terukur pencapaiannya.
- 3) Pihak-pihak non pemerintah juga perlu dilibatkan seperti masyarakat Papua serta swasta dalam menyusun perencanaan pembangunan. Langkah ini dibutuhkan sebagai bentuk mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi sehingga secara tidak langsung akan terbangun rasa memiliki untuk bersama-sama membangun Papua.



Jakarta, Agustus 2022

Penulis

Eko Hariyanto
Kolonel Inf/No. Peserta 025

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Irawan. 2010. Berpihak Pada Manusia: Paradigma Nasional, Pembangunan Indonesia Baru. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abe, Alexader. 2002. Perencanaan Daerah Partisipatif. Solo: Pondok Edukasi.
- Budiman, Arief. 1995. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Covey, Stephen R. 1998. The 7 Habits Of Highly Effective People. New York: Simon & Schuster.
- Lemhanas RI. 2022. Bidang Studi Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional. Jakarta: Lemhanas RI.
- Lemhanas RI. 2022. Bidang Studi Sistem Manajemen Nasional. Jakarta: Lemhanas RI.
- Lemhannas RI. 2022. Bidang Studi Sistem Manajemen Nasional. Jakarta: Lemhannas.
- Nursini. 2010. Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Daerah Teori Dan Aplikasi, diakses <https://core.ac.uk/download/pdf/77629914.pdf>
- Soekanto, Soejono. 1983. Kamus Sosiologi. Jakarta: Rajawali Press.
- Thomas, Lewis dan Elaine B. Johnson. 2014. Contextual Teaching Learning. Jakarta: Kalifa.

Peraturan Perundang-undangan

- Pemerintah RI, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 11 tahun 2020 tentang Renstra tahun 2020-2024.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- Pemerintah RI, Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN.

Jurnal/Artikel

Fatahillah, T. N., Ananda, C. F., & Prasetyia, F. (2021). Dana otonomi khusus Papua, tingkat pembangunan daerah, dan kapasitas pajak. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(4), 345-359

Website/Internet

Bernie, Mohammad dalam <https://tirto.id/masalah-papua-tak-selesai-cuma-dengan-membangun-jalan-egLa>, diakses 26 Januari 2022 pukul 23.21 WIB.

Detik, Luas Wilayah Indonesia Lengkap Daratan dan Lautan, 20 November 2020, tersedia di <https://travel.detik.com/travel-news/d-5262317/luas-wilayah-indonesia-lengkap-daratan-dan-lautan>, diakses pada 8 Februari 2022, pukul 21.34 WIB.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/17/fokus-percepatan-pembangunan-dana-otsus-papua-meningkat>, diakses 30 Januari 2022 pukul 22.21 WIB.

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 27 Desember 2018, Pemerintah ungkap tantangan pembangunan infrastruktur internet, tersedia di <https://kominfo.go.id/content/detail/12182/pemerintah-ungkap-tantangan-pembangunan-infrastruktur-internet/0/sorotan-media>, diakses pada 13 Maret 2021 pukul 22.30 WIB.

Lopes Costa, Fabio Maria dalam <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/12/27/33-orang-jadi-tersangka-korupsi-di-papua-sepanjang-2021>, diakses 31 Januari 2022 pukul 17.00 WIB.

<https://mediaindonesia.com/humaniora/413701/wapres-janjikan-7-program-prioritas-dalam-pembangunan-papua>, diakses 11 April 2022 pukul 19.25 WIB.

<https://www.antaranews.com/infografik/1656662/pembangunan-papua-2020-2024>, diakses 14 Maret 2022 pukul 23.21 WIB.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/15/sensus-penduduk-2020-jumlah-penduduk-papua-tak-sampai-separuh-jakarta>, diakses pada 13 Maret 2022 pukul 22.40 WIB.

<https://deskpapua.bappenas.go.id/berita/detail-berita/catatan-konferensi-memandang-papua-20-tahun-ke-depan-hari-kedua-pentingnya-sinergi-pembangunan-papua>, diakses 18 April 2022 pukul 23.21 WIB.

[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/04/indeks-pembangunan-manusia-papua-naik-tipis-jadi-6062-pada-2021#:~:text=Indeks%20Pembangunan%20Manusia%20\(IPM\)%20Papua%20\(2016%2D2021\)&text=Itu%20tercermin%20dengan%20Indeks%20Pembangunan,2019%20yang%20sebesar%2060%2C8](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/04/indeks-pembangunan-manusia-papua-naik-tipis-jadi-6062-pada-2021#:~:text=Indeks%20Pembangunan%20Manusia%20(IPM)%20Papua%20(2016%2D2021)&text=Itu%20tercermin%20dengan%20Indeks%20Pembangunan,2019%20yang%20sebesar%2060%2C8), diakses 19 April 2022 pukul 15.21 WIB.

<https://regional.kompas.com/read/2020/07/04/19210081/potret-ketimpangan-pembangunan-di-papua-beras-10-kg-seharga-rp-2-juta?page=all>, diakses 19 April 2022 pukul 21.21 WIB.

<https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/600fd974ea589/potret-kelemahan-tata-kelola-pemerintahan-papua-dan-papua-barat>, diakses 18 April 2022 pukul 22.22 WIB.

Lain-lain

Bappenas. Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045.

BPS. 2021. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2021. No. 12/02/94/Tn. XV, 7 Februari 2022.

Kementerian PPN/Bappenas, 16 Juli 2017, Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan, tersedia di <https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/dokumen-perencanaan-dan-pelaksanaan/dokumen-rencana-pembangunan-nasional/rpjp-2005-2025/rpjm-2015-2019/> diakses 13 Maret 2022 pukul 12:12 WIB.

Laporan Komando Daerah Militer XVIII/Kasuari Staf Perencanaan Data Bangunan Yang Dibangun Oleh Pemerintah Dan Belum Difungsikan Di Wilayah Kodam XVIII/Kasuari tahun 2021.

Forum Peneliti Aceh. 2013. PANDUAN Pendampingan Perencanaan Pembangunan Daerah, CPDA, FPA, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan Bappeda Provinsi Aceh.

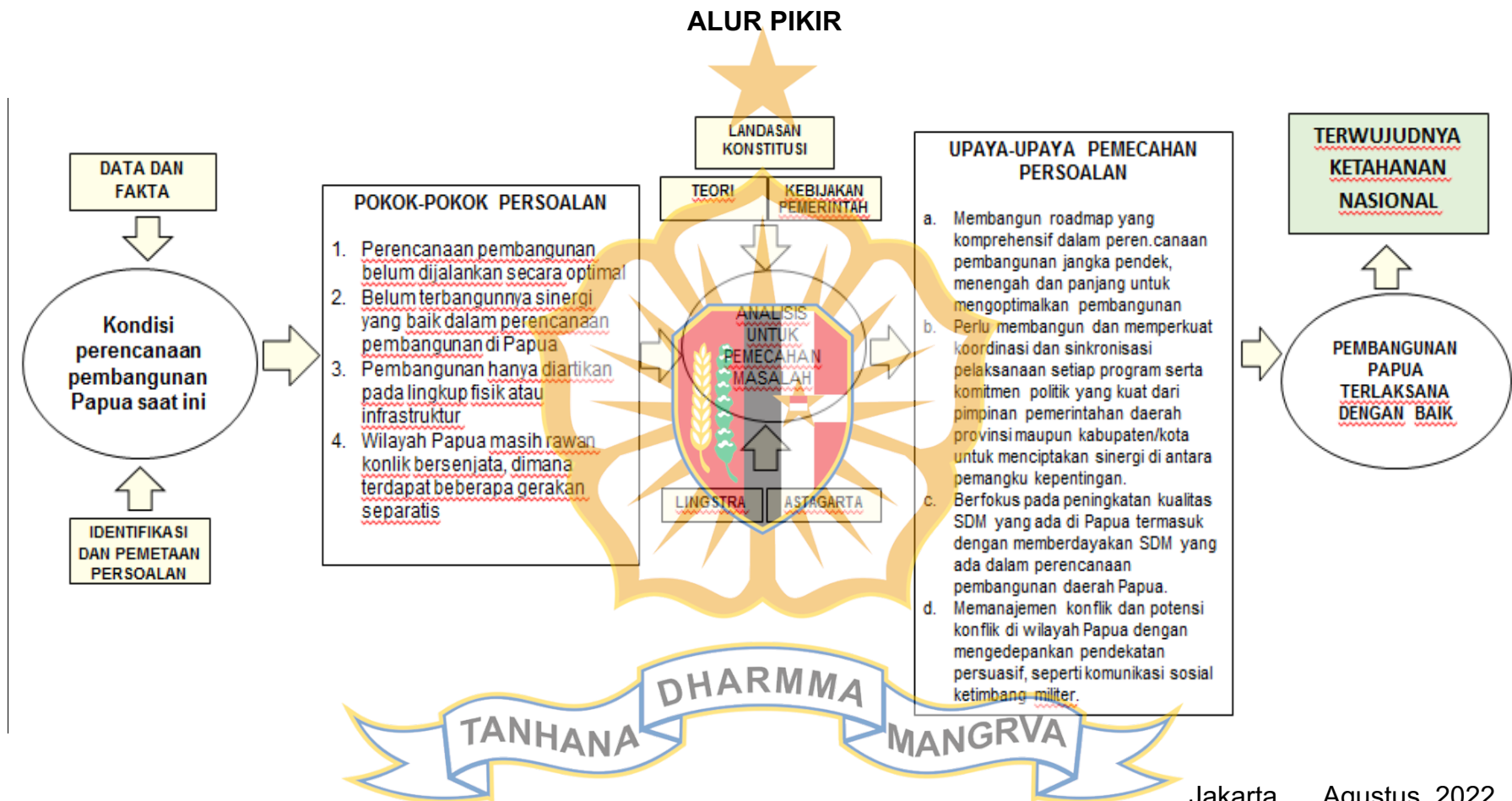
Dannyanti, Sudaryantho. 2018. Optimalisasi Pelaksanaan Proyek dengan Metode PERT dan CPM (Studi Kasus Twin Tower Building Pasca Sarjana UNDIP), Disertasi, Universitas Diponegoro.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Papua 2018-2023.

RPJP Kementerian PPN/Bappenas. Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) tahun 2005-2025.



LAMPIRAN 1



Jakarta, Agustus 2022

Penulis

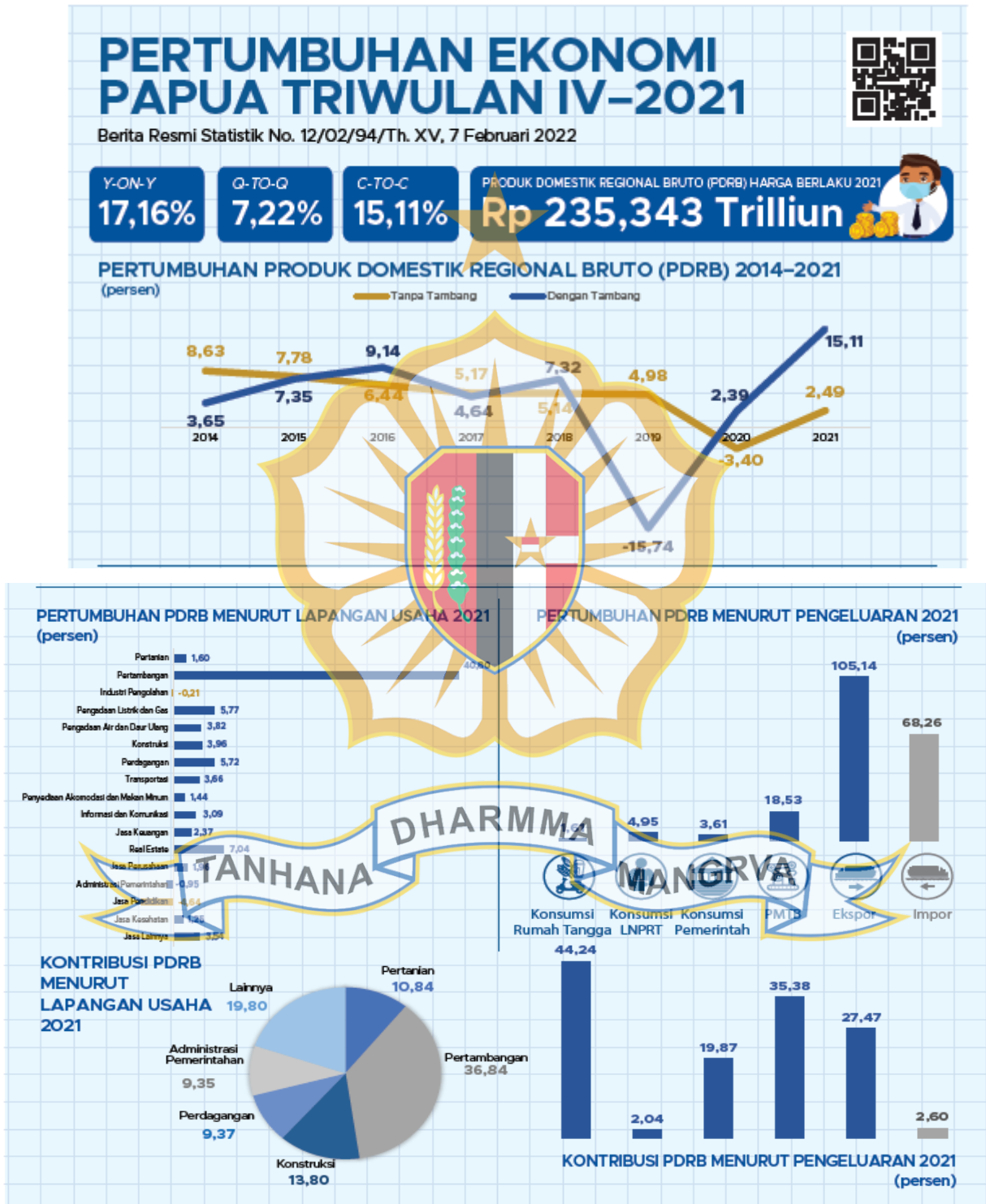
Eko Hariyanto, S.Sos

Kolonel Inf NRP 11940020911271



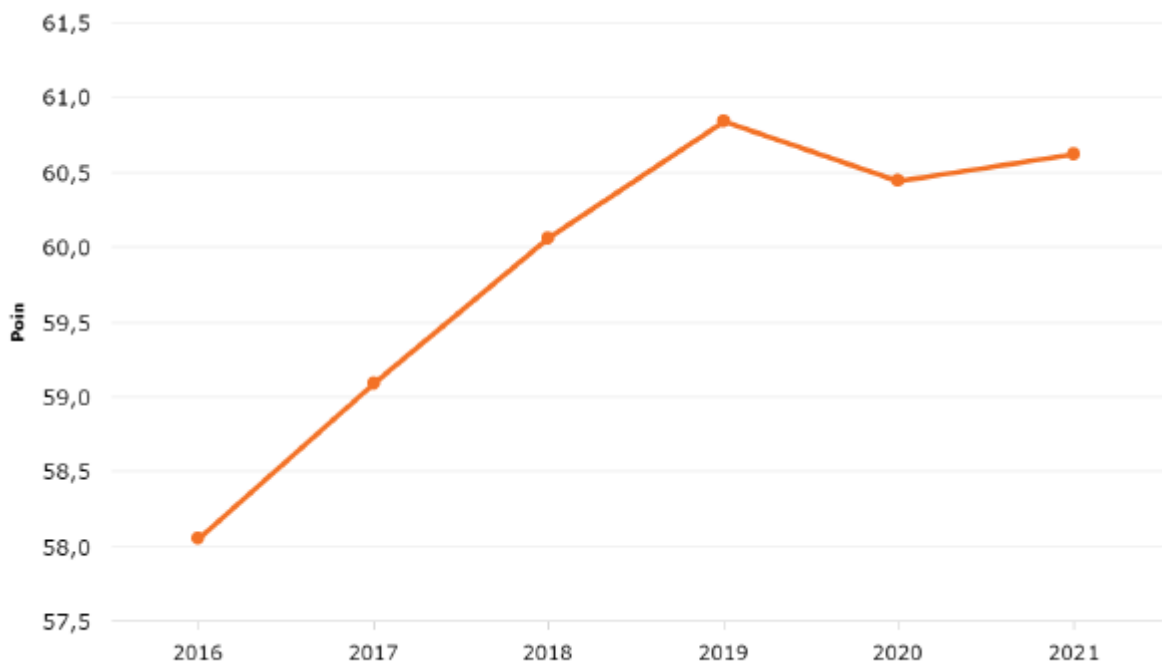
LAMPIRAN 2: KELENGKAPAN DATA

Gambar 1: Pertumbuhan Ekonomi Papua Triwulan IV-2021



Sumber: BPS (2021)

Gambar 2: Indeks Pembangunan Manusia Papua Naik Tipis Jadi 60,62 pada 2021



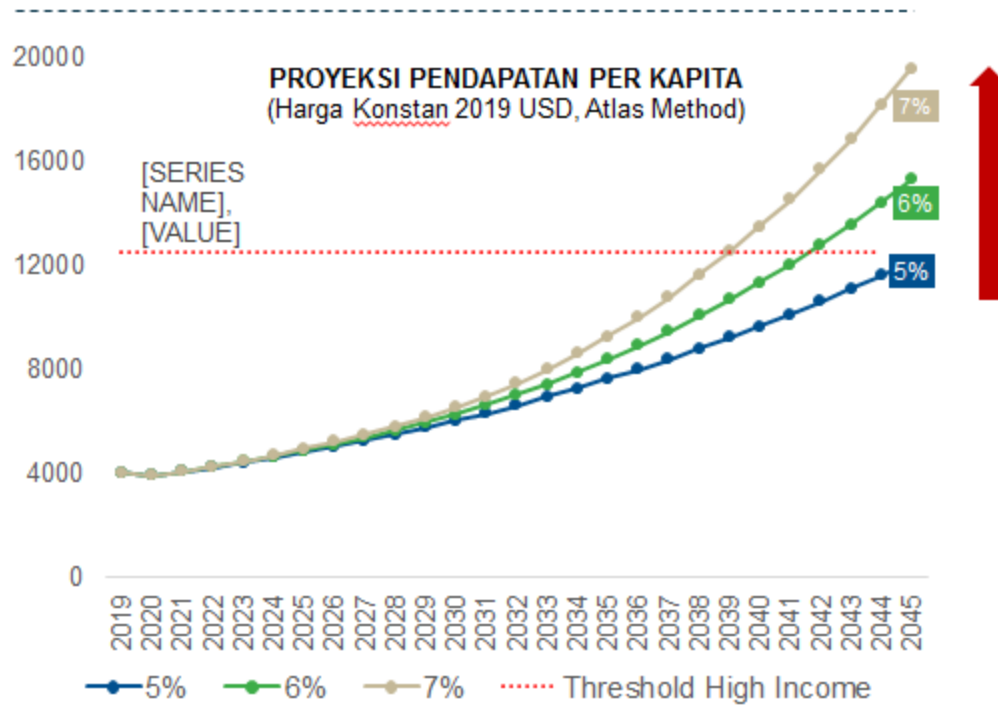
Sumber: BPS (2021)

Gambar 3: Grand Strategi Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2018-2023



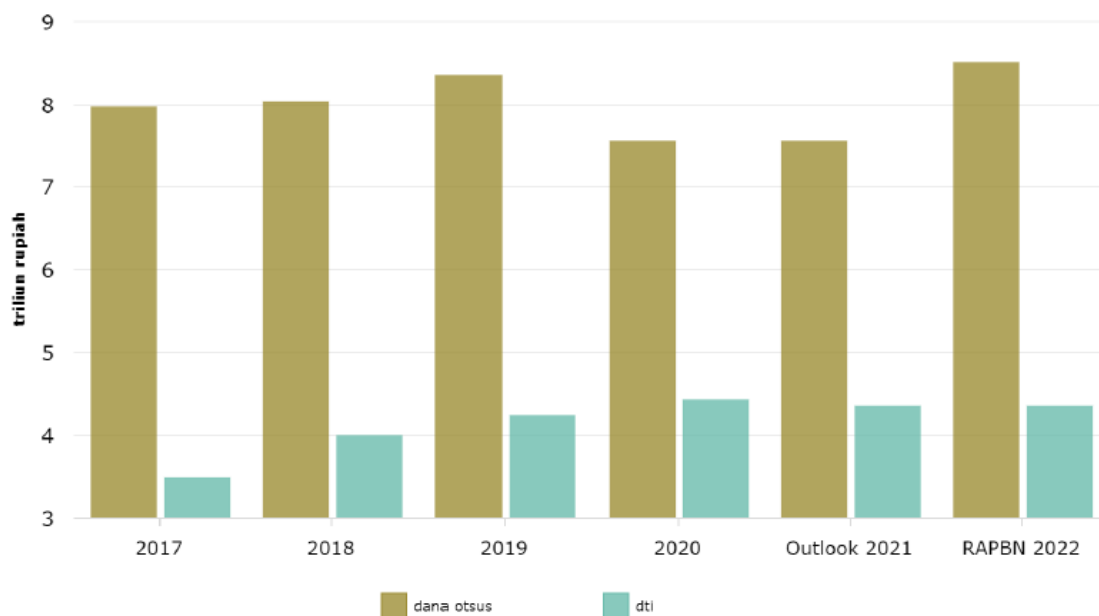
Sumber: RPJMD Papua 2018-2023

Gambar 5: Proyeksi Pendapatan Per kapita



Sumber: Paparan Kemendagri (2022)

Gambar 6: Fokus Percepatan Pembangunan, Dana Otsus Papua Meningkat



Sumber: Kemenkeu (2021)

Tabel 7: IPM di Provinsi Papua 2010-2021

Komponen	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	64,31	64,46	64,60	64,76	64,84	65,09	65,12	65,14	65,36	65,65	65,79	65,93
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	8,57	8,92	9,11	9,58	9,94	9,95	10,23	10,54	10,83	11,05	11,08	11,11
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	5,59	5,60	5,73	5,74	5,76	5,99	6,15	6,27	6,52	6,65	6,69	6,76
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP)	Rp 000	6.251	6.303	6.349	6.394	6.416	6.469	6.637	6.996	7.159	7.336	6.954	6.955
IPM		54,45	55,01	55,55	56,25	56,75	57,25	58,05	59,09	60,06	60,84	60,44	60,62

(Sumber: BPS, 2022)

Tabel 8: IPM di Provinsi Papua Barat 2010-2021

Komponen	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	64,59	64,75	64,88	65,05	65,14	65,19	65,30	65,32	65,55	65,90	66,02	66,14
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,10	11,21	11,45	11,67	11,87	12,06	12,26	12,47	12,53	12,72	12,91	13,13
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,77	6,82	6,87	6,91	6,96	7,01	7,06	7,15	7,27	7,44	7,60	7,69
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP)	Rp 000	6.676	6.708	6.732	6.896	6.943	7.063	7.175	7.493	7.816	8.125	8.086	7.929
IPM		59,60	59,90	60,30	60,91	61,28	61,73	62,21	62,99	63,74	64,70	65,09	65,26

(Sumber: BPS, 2022)

LAMPIRAN 3: DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. NAMA : Eko Hariyanto, S.Sos
2. PANGKAT/KORPS : Kolonel Infanteri
3. NRP : 11940020911271
4. JABATAN : Pamen Denma Mabesad
5. TEMPAT TGL LAHIR : Jember, 10 Desember 1971
6. RIWAYAT JABATAN :



NO	JABATAN	TMT
1	PAMA PUSSENIF	28-07-1994
2	DANTON YONIF KODAM IX/UDAYANA	06-05-1995
3	DANTON II KI D YONIF 745/SYB REM 164/WD DAM IX/UDY	01-07-1996
4	DANTON SLT KIBAN YONIF 745/SYB REM 164/WD/DAM IX/UDY	01-04-1997
5	DANKIPAN A YONIF 745/SYB REM 164/WD DAM IX/UDY	01-10-1998
6	DANKIJAR IV SECATA RINDAM IX/UDY	01-12-1999
7	KAUR OPSJAR/GUMIL TIK SECATA RINDAM IX/UDY	01-01-2001
8	PS. PASIOPS REM 151/BNY DAM XVI/PTM	01-10-2003
9	PASIOPS REM 151/BNY DAM XVI/PTM	01-08-2004
10	WADAN SECATA RINDAM XVI/PTM	01-03-2006
11	PABANDA BHAKTI STERDAM XVI/PTM	15-10-2008
12	KASUBDEPNIKPUR DEPMILDAS AKMIL	05-11-2009
13	KASI PAMOPS MENTAR AKMIL	10-11-2010
14	DANYONIF 516/CY REM 084/BJ DAM V/BRW	15-08-2011
15	DANDIM 0807/TULUNGAGUNG REM 081/DJS DAM V/BRW	07-09-2012
16	PABANDYA-3/ANEVPROGGAR SPABAN V/DALPROGAR SRENAD	04-04-2014
17	ASRENDAM IX/UDY	25-02-2015
18	WADAN RINDAM IX/UDY	10-11-2017
19	PAMEN DENMA MABESAD (DIKREG XLV SESKO TNI TA 2018)	17-04-2018
20	ASRENDAM IV/DIP	27-06-2019
21	PABAN VIII/BINJEMEN SRENAAD	08-06-2020
22	PAMEN DENMA MABESAD	

ALUR PIKIR

OPTIMALISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PAPUA GUNA MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL

